



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Bajiminasa No. 14 Makassar

# Rencana Kerja **2023**

Makassar, Juli 2022

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sehingga dapat tersusun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Renja-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan tetap memperhatikan isu-isu kehutanan yang berkembang melalui Musyawarah Forum SKPD Kehutanan Provinsi dan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.

Terdapat empat sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2023 yaitu meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan, meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan, meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumberdaya alam hayati, terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan, sehingga diharapkan rencana kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran (Rencana Kerja dan Anggaran) pada tahun 2023 sehingga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan terwujud

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan, sehingga Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, tersusun dengan baik.

Makassar, Juli 2022

Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Sulawesi Selatan



Ir. H. ANDI PARENRENGI, M.P  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP.19631231 199703 1020

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Diagram .....	iv
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	3
1.3    Maksud dan Tujuan .....	5
1.4    Sistematika Penulisan .....	6
BAB II    Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 .....	7
2.1    Evaluasi Renja Dinas Kehutanan Prov. Sulsel tahun 2020 .....	7
2.2    Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	46
2.3    Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah .....	58
2.4    Review terhadap rancangan awal RKPD .....	59
2.5    Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .....	78
BAB III    Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	83
3.1    Telaahan terhadap kebijakan nasional .....	83
3.1.1    Tujuan dan sasaran pembangunan daerah .....	83
3.1.2    Prioritas dan sasaran pembangunan nasional 2022 .....	84
3.2    Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 .....	89
3.2.1    Sasaran pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan .....	92
3.3    Program dan kegiatan .....	94
BAB IV    Rencana Kerja dan Pendanaan .....	100
BAB V    Penutup .....	115
5.1    Kaidah-kaidah pelaksanaan .....	115
5.2    Rencana tindak lanjut .....	115

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target dan realisasi tujuan dan sasaran tahun 2021 .....	8
Tabel 2	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra perangkat daerah Sampai dengan tahun 2021 (TC-29) .....	10
Tabel 3	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Prov. Sulsel (TC-30) .....	48
Tabel 4	Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 (TC-31) .....	60
Tabel 5	Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2023 (TC-32) .....	78
Tabel 6	Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 .....	88
Tabel 7	Target kinerja Utama Daerah tahun 2023 .....	91
Tabel 8	Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 .....	91
Tabel 9	Keterkaitan RPJMD dan Rencana Strategis .....	92
Tabel 10	Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dan tahun 2023 .....	93
Tabel 11	Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan(TC-33) .....	100

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Perkembangan perhutanan sosial .....	49
Diagram 2	Kelompok tani hutan .....	50
Diagram 3	Pelibatan Masyarakat pada Perhutanan Sosial .....	51
Diagram 4	Penyuluh Kehutanan, Local Champion, PKSM .....	52
Diagram 5	Polisi Kehutanan .....	53
Diagram 6	Kerusakan kawasan hutan .....	54
Diagram 7	Rehabilitasi Hutan dan Lahan.....	55
Diagram 8	Kontribusi PDRB sektor kehutanan.....	56
Diagram 9	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan.....	57
Diagram 10	Luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan .....	58



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 yaitu mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan, mengintegrasikan pembangunan antar daerah, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, memanfaatkan sumber daya dengan baik, menghubungkan dan menyelenggarakan perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dengan pengawasan. Tentunya perencanaan Pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Mewujudkan hal tersebut diperlukan perencanaan yang logis, rasional, komprehensif dan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Perencanaan yang sistematis akan memberi acuan yang jelas dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan strategis tahunan dan merupakan penjabaran rencana kerja perangkat daerah tahun kelima RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023. Rencana kerja sektor kehutanan pada tahun 2023, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan kehutanan disusun melalui koordinasi, sinergitas dengan pemangku kepentingan. Beberapa program strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan untuk pencapaian sasaran RKPD yaitu menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat, meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah, terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

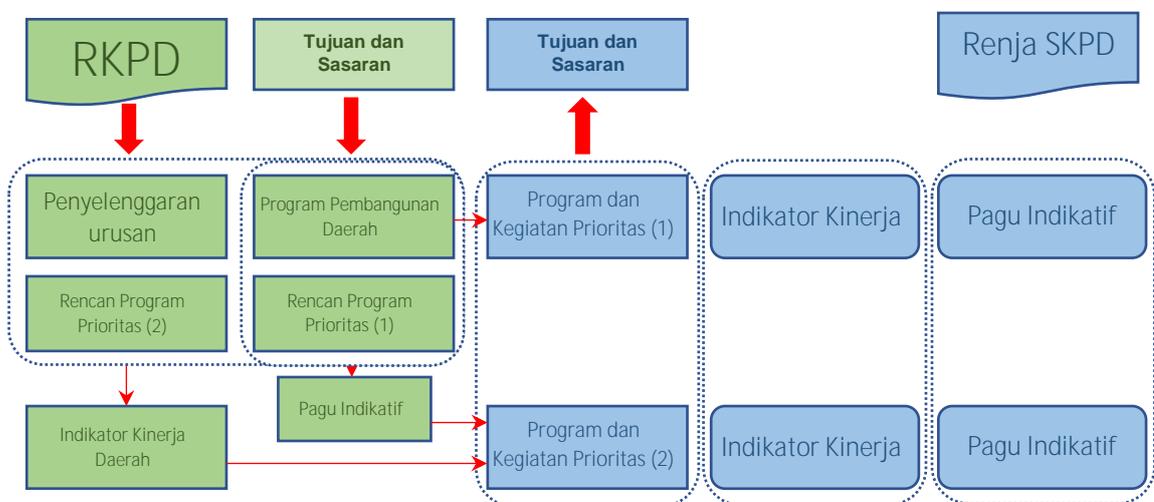
Dokumen perencanaan perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya, tentunya dokumen yang mendasari rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen pembangunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen rencana strategis kementerian/Lembaga terkait.

Rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 berorientasi pada mengoptimalkan pengelolaan hutan di Sulawesi Selatan.



Sasaran yang menjadi fokus pembangunan kehutanan tahun 2023 adalah meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan, meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan dan terbagainya fungsi dan legalitas kawasan hutan. Sejalan dengan tema RKPD tahun 2023 "Pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter". Tema tersebut selaras dengan tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan. Pengelolaan kawasan hutan memiliki peluang yang besar untuk kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan hutan. Pengelolaan potensi hasil hutan bukan kayu mulai dari buah, kulit, daun dan budidaya tumbuhan/ternak lainnya sangat memberi harapan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mikro berbasis pemberdayaan kelompok tani hutan, tentunya pengelolaan hutan tersebut tetap memperhatikan azas kelestarian dan berkesinambungan.

Keterkaitan rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah, secara struktur perencanaan merupakan dokumen berskala daerah yang menghasilkan rencana pembangunan tahunan dan memiliki keterkaitan yang satu sama lain saling mendukung dan menjadi sistem perencanaan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan antara dokumen perencanaan sebagai berikut :





Sehubungan gambar diatas, keterkaitan rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 dengan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 dan rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, diantaranya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diharapkan mencapai 5,04-6,52, dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2023 menargetkan kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB Nasional sebesar 112 trilyun pada tahun 2023. Target tersebut juga menjadi bagian rencana Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui kontribusi sektor kehutanan pada PDRB Sulawesi Selatan sebesar 0,08 % berupa nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi sektor kehutanan. Upaya yang akan ditempuh dengan mengoptimalkan produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan (ekowisata).

Keterkaitan pembangunan Sulawesi Selatan pada sektor kehutanan dalam mendukung kelestarian lingkungan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RKPD tahun 2023 menargetkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 72,84 dan KLHK menargetkan secara nasional sebesar 69,48 (*Renstra KLHK 2020-2024*). Dalam pencapaiannya peran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 sesuai tugas dan fungsinya, menargetkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH) sebesar 58,68 sebagai bagian dari pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Upaya yang direncanakan pada tahun 2023 dengan terus melakukan kolaborasi antar stakeholder untuk pemulihan hutan dan lahan serta perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Oleh karena itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 tahun 2011 tentang Tata Caca Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan
18. Instruksi Preside Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

### 1.3 Maksud dan Tujuan

1. Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 disusun dengan maksud untuk sebagai pedoman dan acuan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam rangka mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
  - a. Menetapkan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Propinsi maupun melalui DAK tahun 2023
  - b. Acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023
  - c. Sebagai tolok ukur penilaian/evaluasi Kinerja Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja

##### Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

##### Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah, program dan kegiatan

##### Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat

##### Bab V. Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan rencana kerja serta kaidah pelaksanaan rencana kerja, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi



## BAB II

## HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Pertimbangan dan arahan masukan terhadap pencapaian program kerja untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang sekaligus penentuan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sebagai berikut :

### 2.1 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021

Sesuai dengan rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan yang akan dicapai meliputi :

1. Tujuan 1 : Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan
  - Sasaran 1.1 : Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan
  - Sasaran 1.2 : Meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi
  - Sasaran 1.3 : Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumberdaya alam hayati
  - Sasaran 1.4 : Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan
2. Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah
  - Sasaran 2.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Target dan realisasi tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sesuai rencana kerja tahun 2021, tersaji pada tabel berikut :



Tabel 1  
Target dan realisasi tujuan dan sasaran tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target tahun 2021	Realisasi tahun 2021	
1. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan		Luas pengelolaan kawasan hutan kewenangan provinsi	1.780.029 ha	1.780.029 ha	
	1.1	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	58,66	55,40
	1.2	Meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi PDRB kehutanan terhadap PDRB Sulsel	0,07	0,06
			Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	12.000 ha	48.639,26 ha
	1.3	Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumberdaya alam hayati	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	7,89 %	9,88 %
			Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	15 %	14,49 %
	1.4	Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan	Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	64,67 %	68,20 %
			Jumlah kesatuan pengelolaan hutan	24 KPH	16 KPH
2. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah		Tingkat akuntabilitas kinerja	75	75,93	
	2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	75	75,93



Tujuan	Sasaran	Indikator	Target tahun 2021	Realisasi tahun 2021
		Persentase ASN nilai Sakip kategori Baik	90 %	95,58 %
		Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	90 %	98,19 %
		Persentase temuan material	5 %	3,9 %

Pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2021 di laksanakan melalui 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) Sub kegiatan dengan uraian sebagaimana pada tabel berikut ;



Tabel TC-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pilihan									
	Bidang Kehutanan									
	20	Program Penatan Hutan dan Pemanfaatan Hutan (Priritas)	% Luas kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya (Prioritas)	64,67 %	68,20 %			-	68,20 %	105,46 %
			Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	2.105 ton	53.342,31			-	53.342,31	2.534,12 %
			Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan	477.175,12 m <sup>3</sup>	1.209.946,94			-	1.209.946,94	252,94 %
	1	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Jeneberang I	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	1 lokasi			-	1 lokasi	100 %
	2	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Jeneberang II	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	1 lokasi			-	1 lokasi	100 %
	3	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Selayar	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi			-	0 lokasi	0 %
	4	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Cenrana	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi			-	0 lokasi	0 %
	5	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Walanae	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi			-	0 lokasi	0 %
	6	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Bulusaraung	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	1 lokasi			-	1 lokasi	100 %
	7	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Ajatappareng	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	1 lokasi			-	1 lokasi	100 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	8 Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Bila	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi				-	0 lokasi	0 %
	9 Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Sawitto	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	1 lokasi				-	1 lokasi	100 %
	10 Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Saddang I	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi				-	0 lokasi	0 %
	11 Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Saddang II	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	1 lokasi				-	1 lokasi	100 %
	12 Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Latimojong	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	1 lokasi				-	1 lokasi	100 %
	13 Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Rongkong	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi				-	0 lokasi	0 %
	14 Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Kalaena	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	1 lokasi				-	1 lokasi	100 %
	15 Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Larona Mallii	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi				-	0 lokasi	0 %
	16 Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Mata Allo	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	0 lokasi				-	0 lokasi	0 %
	17 Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Jeneberang I	Jumlah patok batas blok dan petak	500 buah	0 buah				-	0 buah	0 %
	18 Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Jeneberang II	Jumlah patok batas blok dan petak	500 buah	0 buah				-	0 buah	0 %
	19 Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Selayar	Jumlah patok batas blok dan petak	500 buah	0 buah				-	0 buah	0 %
	20 Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Cenrana	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah				-	0 buah	0 %
	21 Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Walanae	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah				-	0 buah	0 %
	22 Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Bulusaraung	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah				-	0 buah	0 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	23	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Ajatappareng	Jumlah patok batas blok dan petak	250 buah	0 buah			-	0 buah	0 %
	24	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Bila	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah			-	0 buah	0 %
	25	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Sawitto	Jumlah patok batas blok dan petak	250 buah	0 buah			-	0 buah	0 %
	26	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Saddang I	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah			-	0 buah	0 %
	27	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Saddang II	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah			-	0 buah	0 %
	28	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Latimojong	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah			-	0 buah	0 %
	29	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Rongkong	Jumlah patok batas blok dan petak	500 buah	0 buah			-	0 buah	0 %
	30	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Kalaena	Jumlah patok batas blok dan petak	500 buah	0 buah			-	0 buah	0 %
	31	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Larona Malili	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah			-	0 buah	0 %
	32	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Mata Allo	Jumlah patok batas blok dan petak	374 buah	0 buah			-	0 buah	0 %
	33	Review perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Jumlah kabupaten/kota pengusul	4 kab/kota	0 kab/kota			-	0 kab/kota	0 %
	34	Pembinaan dan pengawasan GANIS dan WASGANIS	Jumlah GANIS dan WASGANIS yang dibina	40 orang	0 orang			-	0 orang	0 %
	35	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, IUPHHK, IPHHK, IPK	135 izin	17 izin			-	17 izin	12,59 %
	36	Penyusunan bisnis plan	Jumlah buku bisnis plan	16 dokumen	0 dokumen			-	0 dokumen	0 %
	37	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil hutan	Jumlah industri yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi	300 industri	85 industri			-	85 industri	28,33 %
	38	Monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PSDH/DR	Jumlah data perhitungan iuran kehutanan	10 laporan	2 laporan			-	2 laporan	20 %
			Jumlah pemegang izin yang wajib bayar PSDH/DR	300 izin	152 izin			-	152 izin	50,66 %
21	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Cakupan ketersediaan jumlah bibit	5.000.000 bibit	1.010.398 bibit				-	1.010.398 bibit	20,21 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (Prioritas)	5.000 ha	21.018 ha				-	21.018 ha	420,36 %
		Indeks kualitas tutupan lahan (Prioritas)	58,68	54,94				-	54,94	93,72 %
	21	1 Pembuatan persemaian di wilayah KPH Jeneberang I	1 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
		2 Pembuatan persemaian di wilayah KPH jeneberang II	1 unit	1 unit				-	1 unit	100 %
		3 Pembuatan persemaian di wilayah KPH Selayar	1 unit	1 unit				-	1 unit	100 %
		4 Pembuatan persemaian di wilayah KPH Cenrana	1 unit	1 unit				-	1 unit	100 %
		5 Pembuatan persemaian di wilayah KPH Walanae	1 unit	1 unit				-	1 unit	100 %
		6 Pembuatan persemaian di wilayah KPH Bulusaraung	1 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
		7 Pembuatan persemaian di wilayah KPH Ajatappareng	1 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
		8 Pembuatan persemaian di wilayah KPH Bila	1 unit	1 unit				-	1 unit	100 %
		9 Pembuatan persemaian di wilayah KPH Sawitto	1 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
		10 Pembuatan persemaian di wilayah KPH Saddang I	1 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
		11 Pembuatan persemaian di wilayah KPH Saddang II	1 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
		12 Pembuatan persemaian di wilayah KPH Latimojong	1 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
		13 Pembuatan persemaian di wilayah KPH Rongkong	1 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
		14 Pembuatan persemaian di wilayah KPH Kalaena	1 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
		15 Pembuatan persemaian di wilayah KPH Larona Malili	1 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
		16 Pembuatan persemaian di wilayah KPH Mata Allo	1 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
		17	Jumlah unit dam penahan	28 unit	20 unit			-	20 unit	71,43 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK VI dan VII / KPH Jeneberang I	Jumlah unit gully plug	24 unit	13 unit				-	13 unit	54,16 %
		Jumlah unit sumur resapan	24 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
	18 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK VII dan VIII / KPH Jeneberang II	Jumlah unit dam penahan	40 unit	16 unit				-	16 unit	40,00 %
		Jumlah unit gully plug	24 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
		Jumlah unit sumur resapan	24 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
	19 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK VIII / KPH Selayar	Jumlah unit dam penahan	8 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
		Jumlah unit gully plug	12 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
		Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
	20 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK V / KPH Cenrana	Jumlah unit dam penahan	11 unit	3 unit				-	3 unit	27,27 %
		Jumlah unit gully plug	18 unit	6 unit				-	6 unit	75,00 %
		Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
	21 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK V / KPH Walanae	Jumlah unit dam penahan	18 unit	2 unit				-	2 unit	11,11 %
		Jumlah unit gully plug	25 unit	1 unit				-	1 unit	4,00 %
		Jumlah unit sumur resapan	24 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
	22 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK I / KPH Bulusaraung	Jumlah unit dam penahan	18 unit	2 unit				-	2 unit	11,11 %
		Jumlah unit gully plug	35 unit	11 unit				-	11 unit	31,42 %
		Jumlah unit sumur resapan	24 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
	23 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK II / KPH Ajatappareng	Jumlah unit dam penahan	9 unit	1 unit				-	1 unit	11,11 %
		Jumlah unit gully plug	13 unit	1 unit				-	1 unit	7,69 %
		Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
	24 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK II / KPH Bila	Jumlah unit dam penahan	26 unit	2 unit				-	2 unit	7,69 %
		Jumlah unit gully plug	24 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
		Jumlah unit sumur resapan	24 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
	25 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK II / KPH Sawitto	Jumlah unit dam penahan	10 unit	2 unit				-	2 unit	20,00 %
		Jumlah unit gully plug	12 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
		Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
	26 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK III / KPH Saddang I	Jumlah unit dam penahan	16 unit	4 unit				-	4 unit	25,00 %
		Jumlah unit gully plug	20 unit	8 unit				-	8 unit	40,00 %
		Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
	27 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK III / KPH Saddang II	Jumlah unit dam penahan	14 unit	2 unit				-	2 unit	14,28 %
		Jumlah unit gully plug	15 unit	3 unit				-	3 unit	20,00 %
		Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit				-	0 unit	0 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	28	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK IV / KPH Latimojong	Jumlah unit dam penahan	15 unit	3 unit			-	3 unit	20,00 %
			Jumlah unit gully plug	30 unit	6 unit			-	6 unit	20,00 %
			Jumlah unit sumur resapan	24 unit	0 unit			-	0 unit	0 %
	29	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK IV / KPH Rongkong	Jumlah unit dam penahan	13 unit	1 unit			-	1 unit	7,69 %
			Jumlah unit gully plug	14 unit	2 unit			-	2 unit	14,28 %
			Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit			-	0 unit	0 %
	30	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK IV / KPH Kalaena	Jumlah unit dam penahan	8 unit	0 unit			-	0 unit	0 %
			Jumlah unit gully plug	12 unit	0 unit			-	0 unit	0 %
			Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit			-	0 unit	0 %
	31	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK IV / KPH Larona Malili	Jumlah unit dam penahan	9 unit	1 unit			-	1 unit	11,11 %
			Jumlah unit gully plug	12 unit	0 unit			-	0 unit	0 %
			Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit			-	0 unit	0 %
	32	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK III / KPH Mata Allo	Jumlah unit dam penahan	12 unit	4 unit			-	4 unit	33,33 %
			Jumlah unit gully plug	21 unit	9 unit			-	9 unit	42,85 %
			Jumlah unit sumur resapan	12 unit	0 unit			-	0 unit	0 %
	33	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada Wilayah CDK VI dan CDK VII / Wilayah KPH Jeneberang I	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	116 ha	0 ha			-	0 ha	0 %
			Luas pemeliharaan tanaman bambu	105 ha	40 ha			-	40 ha	38,09 %
			Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	400 ha	0 ha			-	0 ha	0 %
			Luas pembuatan tanaman mangrove	62 ha	50 ha			-	50 ha	80,64 %
			Luas pembuatan tanaman bambu	20 ha	0 ha			-	0 ha	0 %
	34	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK VII dan VIII / KPH Jeneberang II	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	36 ha	0 ha			-	0 ha	0 %
			Luas pemeliharaan tanaman bambu	95 ha	40 ha			-	40 ha	42,10 %
			Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	420 ha	60 ha			-	60 ha	14,28 %
			Luas pembuatan tanaman mangrove	23 ha	10 ha			-	10 ha	43,47 %
			Luas pembuatan tanaman bambu	12 ha	0 ha			-	0 ha	0 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	180 ha	100 ha				-	100 ha	55,55 %
	35 Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK VIII / KPH Selayar	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	15 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	15 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	160 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	12 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	110 ha	30 ha				-	30 ha	27,27 %
	36 Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK V / KPH Cenrana	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	15 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	20 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	200 ha	50 ha				-	50 ha	25,00 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	10 ha	10 ha				-	10 ha	100,00 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	80 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
	37 Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK V / KPH Walanae	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	15 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	15 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	200 ha	50 ha				-	50 ha	25,00 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	12 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	80 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
	38	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	121 ha	0 ha				-	0 ha	0 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK I / KPH Bulusaraung	Luas pemeliharaan tanaman bambu	155 ha	25 ha				-	25 ha	16,12 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	100 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	66 ha	53 ha				-	53 ha	80,30 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	57 ha	45 ha				-	45 ha	78,94 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	80 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
	39 Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK II / KPH Ajatappareng	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	18 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	9 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	202 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	9 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	159 ha	25 ha				-	25 ha	15,72 %
	40 Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK II / KPH Bila	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	15 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	20 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	100 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	10 ha	10 ha				-	10 ha	100,00 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	80 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
	41 Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK II / KPH Sawitto	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	15 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	30 ha	5 ha				-	5 ha	16,66 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	100 ha	0 ha				-	0 ha	0 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	10 ha	10 ha				-	10 ha	100 ha
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	80 ha	10 ha				-	10 ha	12,50 %
	42	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK III / KPH Saddang I	Luas pemeliharaan tanaman bambu	55 ha	20 ha			-	20 ha	36,36 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	280 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	12 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	180 ha	100 ha				-	100 ha	55,55
	43	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK III / KPH Saddang II	Luas pemeliharaan tanaman bambu	15 ha	0 ha			-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	100 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	12 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	80 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
	44	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK IV / KPH Latimojong	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	15 ha	0 ha			-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	105 ha	5 ha				-	5 ha	4,76 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	430 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	52 ha	40 ha				-	40 ha	80,76 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	245 ha	165 ha				-	165 ha	67,34 %
	45	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK IV / KPH Kalaena	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	15 ha	0 ha			-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	55 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	100 ha	0 ha				-	0 ha	0 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	32 ha	20 ha				-	20 ha	62,50 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	80 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
	46	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK IV / KPH Larona Malili								
		Luas pemeliharaan tanaman mangrove	15 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	25 ha	5 ha				-	5 ha	20,00 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	115 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	12 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	12 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	85 ha	10 ha				-	10 ha	11,76 %
	47	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK IV / KPH Rongkong								
		Luas pemeliharaan tanaman mangrove	150 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	65 ha	20 ha				-	20 ha	30,76 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	275 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman mangrove	75 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	20 ha	20 ha				-	20 ha	100,00 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	160 ha	100 ha				-	100 ha	62,50 %
	48	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK III / KPH Mata Allo								
		Luas pemeliharaan tanaman bambu	25 ha	10 ha				-	10 ha	40,00 %
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	175 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman bambu	12 ha	0 ha				-	0 ha	0 %
		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	110 ha	50 ha				-	50 ha	45,45 %
	49	Luas rancangan RHL	5.000 ha	420 ha				-	420 ha	8,4 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan dan pengawasan DAS dan RHL	Jumlah buku pengelolaan DAS	2 buku	2 buku				-	2 buku	100,00 %
		Jumlah pelaksanaan monitoring dan pembinaan RHL	150 kali	47 kali				-	47 kali	31,33 %
	50 Pembinaan, penilaian, evaluasi kegiatan RHL dan revegetasi pasca tambang	Jumlah pemegang izin yang melakukan revegetasi pasca tambang	4 izin	0 izin				-	0 izin	0 %
	51 Kampanye/gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia	Jumlah masyarakat dan pihak terkait yang hadir dan berpartisipasi pada HMPi	1.000 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	52 Penguatan aktivitas kelembagaan forum DAS	Jumlah pertemuan/rapat yang dilaksanakan	16 kali	0 kali				-	0 kali	0 %
	54 Pendampingan dan bimbingan teknis pelaksanaan RHL	Jumlah pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis RHL	60 kali	0 kali				-	0 kali	0 %
	55 Pembuatan dan pemeliharaan sumber benih unggul	Jumlah lokasi sumber benih unggul yang dibuat dan dipelihara	4 lokasi	12 lokasi				-	12 lokasi	300 %
		Jumlah peserta bimbingan teknis pembibitan tanaman hutan bagi pelajar	2.320 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	56 Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana produksi benih dan bibit tanaman hutan	Jumlah jenis sarana prasarana produksi benih dan bibit tanaman hutan	5 jenis	5 jenis				-	5 jenis	100 %
	57 Pengujian dan sertifikasi benih dan bibit tanaman hutan	Jumlah pemohon yang diproses sertifikasi	75 pemohon	16 pemohon				-	16 pemohon	21,33 %
		Jumlah sampel pengujian	75 sampel	16 sampel				-	16 sampel	21,33 %
	58 Pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan	Jumlah kabupaten pengawasan peredaran benih	23 kab	0 kab				-	0 kab	0 %
	59 Identifikasi calon sumber benih tanaman hutan dan identifikasi pengada/pengedar benih dan bibit tanaman hutan	Jumlah laporan pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan	5 laporan	0 laporan				-	0 laporan	0 %
	60 Koordinasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca	Jumlah pelaksanaan pertemuan adaptasi dan mitigasi RAD GRK	25 kali	0 kali				-	0 kali	0 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	61	Sosialisasi perbenihan tanaman hutan	Jumlah peserta sosialisasi perbenihan tanaman hutan	400 orang	0 orang			-	0 orang	0 %
	62	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK I/ KPH Bulusaraung)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	17.225 batang	3.445 batang			-	3.445 batang	20,00 %
	63	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK II/ KPH Ajatappareng)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	17.225 batang	3.445 batang			-	3.445 batang	20,00 %
	64	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK II/ KPH Bila)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	17.225 batang	3.445 batang			-	3.445 batang	20,00 %
	65	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK II/ KPH Sawitto)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	13.780 batang	0 batang			-	0 batang	0 %
	66	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK III/ KPH Mata Allo)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	17.225 batang	3.445 batang			-	3.445 batang	20,00 %
	67	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK III/ KPH Saddang I)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	17.225 batang	3.445 batang			-	3.445 batang	20,00 %
	68	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK III/ KPH Saddang II)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	13.780 batang	0 Batang			-	0 Batang	0 %
	69	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK IV/ KPH Latimojong)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	17.225 batang	3.445 batang			-	3.445 batang	20,00 %
	70	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK IV/ KPH Rongkong)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	17.225 batang	3.445 batang			-	3.445 batang	20,00 %
	71	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK IV/ KPH Kalaena)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	13.780 batang	0 batang			-	0 batang	0 %
	72	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK IV/ KPH Laroni Malili)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	3.445 batang	3.445 batang			-	3.445 batang	100 %
	73	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK V/ KPH Walanae)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	3.445 batang	3.445 batang			-	3.445 batang	100 %
	75	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK VI dan VII/KPH Jeneberang I)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	3.445 batang	3.445 batang			-	3.445 batang	100 %
	76	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK VII dan VIII/KPH Jeneberang II)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	3.445 batang	3.445 batang			-	3.445 batang	100 %
	77	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK VIII/KPH Selayar)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	3.445 batang	3.445 batang			-	3.445 batang	100 %
	22	Program Perhutanan Sosial	Luas areal wilayah kelola masyarakat dengan skema perhutanan sosial	48.953 ha	161.133,22 ha			-	161.133,22 ha	329,15 %
			Jumlah kelompok yang dibentuk dan dibina	160 kelompok	143 kelompok			-	143 kelompok	89,37 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	1 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK VI dan CDK VII / KPH Jeneberang I	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	10 kelompok tani	27 kelompok tani				-	27 kelompok tani	270 %
	2 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK VII dan CDK VIII / KPH Jeneberang II	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	9 kelompok tani	1 kelompok tani				-	1 kelompok tani	11,11 %
	3 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK VIII / KPH Selayar	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	8 kelompok tani	0 kelompok tani				-	0 kelompok tani	0 %
	4 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK V / KPH Cenrana	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	9 kelompok tani	1 kelompok tani				-	1 kelompok tani	11,11 %
	5 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK V / KPH Walanae	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	10 kelompok tani	19 kelompok tani				-	19 kelompok tani	190 %
	6 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK I / KPH Bulusaraung	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	9 kelompok tani	3 kelompok tani				-	3 kelompok tani	33,33 %
	7 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK II / KPH Ajatappareng	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	8 kelompok tani	0 kelompok tani				-	0 kelompok tani	0 %
	8 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK II / KPH Bila	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	9 kelompok tani	4 kelompok tani				-	4 kelompok tani	44,44 %
	9 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK II / KPH Sawitto	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	9 kelompok tani	1 kelompok tani				-	1 kelompok tani	11,11 %
	10 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK III / KPH Saddang I	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	10 kelompok tani	2 kelompok tani				-	2 kelompok tani	20,00 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	11 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK III / KPH Saddang II	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	9 kelompok tani	1 kelompok tani				-	1 kelompok tani	11,11 %
	12 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK IV / KPH Latimojong	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	9 kelompok tani	1 kelompok tani				-	1 kelompok tani	11,11 %
	13 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK IV / KPH Rongkong	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	8 kelompok tani	0 kelompok tani				-	0 kelompok tani	0 %
	14 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK IV / KPH Kalaena	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	8 kelompok tani	0 kelompok tani				-	0 kelompok tani	0 %
	15 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK IV / KPH Larena Malili	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	8 kelompok tani	0 kelompok tani				-	0 kelompok tani	0 %
	16 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK III / KPH Mata Allo	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	9 kelompok tani	1 kelompok tani				-	1 kelompok tani	11,11 %
	33 Pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	400 Orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	34 Pembinaan, monitoring dan evaluasi perhutanan sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dibina, dimonitoring dievaluasi	100 kelompok	26 kelompok				-	26 kelompok	26,00 %
	35 Pertemuan koordinasi dan peningkatan kapasitas pendamping dan kelompok usaha perhutanan sosial	Jumlah pelaksanaan pertemuan perhutanan sosial	4 kali	0 kali				-	0 kali	0 %
		Jumlah pendamping dan kelompok usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan kapasitasnya	64 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	36	Jumlah koperasi tani hutan yang dibentuk	5 kelompok	1 kelompok				-	1 kelompok	20 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembentukan koperasi tani hutan dan peningkatan kelas KTH	Jumlah KTH kelas kemampuan madya dan utama	11 kelompok	11 kelompok				-	11 kelompok	100 %
	37 Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan	Jumlah unit penyelenggara penyuluhan	16 unit penyelenggara	16 unit penyelenggara				-	16 unit penyelenggara	100 %
23	Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati	Persentase tindak pidana khusus kehutanan yang ditangani	100 %	100 %				-	100 %	100 %
	17 Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Jeneberang I	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	20 kali				-	20 kali	27,77 %
	18 Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Jeneberang II	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	18 kali				-	18 kali	25,00 %
	19 Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Selayar	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	18 kali				-	18 kali	25,00 %
	20 Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Cenrana	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	18 kali				-	18 kali	25,00 %
	21 Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Walanae	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	18 kali				-	18 kali	25,00 %
	22 Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Bulusaraung	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	18 kali				-	18 kali	25,00 %
	23 Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Ajatappareng	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	27 kali				-	27 kali	37,50 %
	24 Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Bila	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	25 kali				-	25 kali	34,72 %
	25 Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Sawitto	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	28 kali				-	28 kali	38,88 %
	26 Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Saddang I	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	72 kali	33 kali				-	33 kali	45,83 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	27	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Saddang II	72 kali	18 kali				-	18 kali	25,00 %
	28	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Latimojong	72 kali	18 kali				-	18 kali	25,00 %
	29	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Rongkong	72 kali	18 kali				-	18 kali	25,00 %
	30	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Kalaena	72 kali	18 kali				-	18 kali	25,00 %
	31	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Larona Malili	72 kali	18 kali				-	18 kali	25,00 %
	32	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Mata Allo	72 kali	18 kali				-	18 kali	25,00 %
	33	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan wilayah KPH. Jeneberang I	5 jenis	1 jenis				-	1 jenis	20,00 %
	34	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Jeneberang II	4 jenis	0 jenis				-	0 jenis	0 %
	35	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Selayar	4 jenis	0 jenis				-	0 jenis	25,00 %
	36	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Cenrana	4 jenis	0 jenis				-	0 jenis	0 %
	37	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Walanae	5 jenis	1 jenis				-	1 jenis	20,00 %
	38	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Bulusaraung	5 jenis	1 jenis				-	1 jenis	20,00 %
	39	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Ajatappareng	5 jenis	0 jenis				-	0 jenis	0 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	40	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Bila	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	4 jenis	1 jenis			-	1 jenis	25,00 %
	41	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Sawitto	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	4 jenis	0 jenis			-	0 jenis	0 %
	42	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Saddang I	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	4 jenis	0 jenis			-	0 jenis	0 %
	43	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Saddang II	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	5 jenis	1 jenis			-	1 jenis	20,00 %
	44	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Latimojong	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	5 jenis	1 jenis			-	1 jenis	20,00 %
	45	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Kalaena	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	5 jenis	1 jenis			-	1 jenis	20,00 %
	46	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Larona Malili	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	4 jenis	0 jenis			-	0 jenis	0 %
	47	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Rongkong	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	5 jenis	1 jenis			-	1 jenis	20,00 %
	48	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Mata Allo	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	4 jenis	0 jenis			-	0 jenis	0 %
	50	Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga perlindungan dan pengamanan hutan	Jumlah tenaga perlindungan dan pengamanan hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	260 orang	0 orang			-	0 orang	0 %
	51	Monitoring dan koordinasi perlindungan dan pengamanan hutan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan koordinasi perlindungan dan pengamanan hutan	80 kali	8 kali			-	8 kali	10,00 %
	52	Operasi gabungan dan penanganan tindak pidana khusus kehutanan	Jumlah pelaksanaan operasi gabungan	5 kali	1 kali			-	1 kali	20,00 %
			Jumlah kasus tindak pidana kehutanan	5 kasus	5 kasus			-	5 kasus	100,00 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	54	Pembinaan dan monitoring tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi	25 kali	4 kali				-	4 kali	16,00 %
24	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentaseluas kebakaran hutan yang dikendalikan	100 %						-		
	1	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Jeneberang I	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	2	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Jeneberang II	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	3	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Selayar	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	4	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Cenrana	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	5	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Walanae	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	6	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Bulusaraung	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	7	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Ajatappareng	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	8	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Bila	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	9	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Sawitto	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	10	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Saddang I	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	11	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Saddang II	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang				-	0 orang	0 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	12	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Latimojong	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang			-	0 orang	0 %
	13	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Rongkong	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang			-	0 orang	0 %
	14	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Kalaena	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang			-	0 orang	0 %
	15	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Larona Malili	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang			-	0 orang	0 %
	16	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Mata Allo	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	320 orang	0 orang			-	0 orang	0 %
	17	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK I/ wilayah KPH Bulusaraung)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali			-	0 kali	0 %
			Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang			-	0 orang	0 %
	18	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK II/ wilayah KPH Ajatappareng)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali			-	0 kali	0 %
			Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang			-	0 orang	0 %
	19	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK II/ wilayah KPH Bila)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali			-	0 kali	0 %
			Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang			-	0 orang	0 %
	20	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK II/ wilayah KPH Sawitto)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali			-	0 kali	0 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	21	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK III/ wilayah KPH Mata Allo)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali			-	0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	22	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK III/ wilayah KPH Saddang I)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali			-	0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	23	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK III/ wilayah KPH Saddang II)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali			-	0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	24	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK IV/ wilayah KPH Latimojong)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali			-	0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	25	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK IV/ wilayah KPH Rongkong)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali			-	0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	26	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK IV/ wilayah KPH Kalaena)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali			-	0 kali	0 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	27	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK IV/ wilayah KPH Larona Malili)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali			-	0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	28	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK V/ wilayah KPH Walanae)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali			-	0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	29	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK V/ wilayah KPH Cenrana)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali			-	0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	30	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK VI dan CDK VII/ wilayah KPH Jeneberang I)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali			-	0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	31	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK VII dan CDK VIII/ wilayah KPH Jeneberang II)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali			-	0 kali	0 %
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	32	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK VIII/ wilayah KPH Selayar)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	48 kali	0 kali			-	0 kali	0 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	400 orang	0 orang				-	0 orang	0 %
	49 Pengembangan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan	Jumlah jenis sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	9 jenis	6 jenis				-	6 jenis	66,66 %
	53 Monitoring dan pembinaan, pencegahan, pengendalian dan pasca kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan pembinaan, pengendalian dan pasca kebakaran hutan dan lahan	50 kali	10 kali				-	10 kali	20 %
	50 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %				-	100 %	100 %
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan				-	12 bulan	100 %
	2 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	30 unit	33 unit				-	33 unit	110 %
		Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	35 unit	88 unit				-	88 unit	251,43 %
	3 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	393 orang	379 orang				-	379 orang	100 %
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	75 jenis	137 jenis				-	137 jenis	182,67 %
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	150 unit	34 jenis				-	34 jenis	22,67 %
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	2 jenis	2 jenis				-	2 jenis	100 %
	9 Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	20 pameran	3 pameran				-	3 pameran	15 %
	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	176 kali	437 kali				-	437 kali	248,30 %
	51 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %	100 %				-	100 %	100 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	1 unit	1 unit				-	1 unit	100 %
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	100 unit	36 unit				-	36 unit	36 %
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	177 unit	939 unit				-	939 unit	530,5 %
	7 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	50 unit	0 unit				-	0 unit	0 %
	9 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	2.221 unit	733 unit				-	733 unit	33 %
	10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	150 unit	50 unit				-	50 unit	33,33 %
52	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %	100 %				-	100 %	100 %
	1 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	225 orang	150 orang				-	150 orang	66,67 %
	2 Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	10 dokumen	5 dokumen				-	5 dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	10 dokumen	3 dokumen				-	3 dokumen	30 %
		Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	1 dokumen				-	1 dokumen	50 %
		Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	10 dokumen	7 dokumen				-	7 dokumen	70 %
	3 Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	5 usulan kegiatan	3 usulan kegiatan				-	3 usulan kegiatan	60 %



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	4	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	5 laporan	2 laporan			-	2 laporan	40 %
			Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	500 jenis	128 jenis			-	128 jenis	25,60 %
	5	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	60 laporan	24 laporan			-	24 laporan	40 %
	6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	10 laporan	2 laporan			-	2 laporan	20 %
53		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% ASN berkinerja sangat baik	80 %	89,77 %			-	89,77 %	112,21 %
		Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya	968 orang	890 orang			-	890 orang	91,94 %
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	5 laporan	2 laporan			-	2 laporan	40 %
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	300 orang	0 orang			-	0 orang	0 %
		Program Pengelolaan Hutan	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	65,47 %	57,91 %	61,60 %	65,61 %	65,61 %	61,60 %	65,61 %
			Persentase kerusakan kawasan hutan per tahun	14,82 %	17,59 %	16,2 %	0,08 %		16,2 %	0,08 %
			Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	92.336,63 m <sup>3</sup>	92.336,63 m <sup>3</sup>	92.336,63 m <sup>3</sup>	26 m <sup>3</sup>		92.336,63 m <sup>3</sup>	134.211,35 m <sup>3</sup>
			Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 ton	283 ton	283 ton	646,58 ton		283 ton	18.423,14 ton
		Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi	Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya							
		- Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen rancang bangun KPH							
		- Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH	Jumlah patok batas blok dan petak							
			Panjang penataan batas blok dan petak							



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah jenis sarana prasarana operasionalisasi KPH								
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Luas Wilayah yang diusulkan untuk perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan								
	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencanan Pengelolaan KPH								
	- Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP KPH								
		Jumlah dokumen RPHJpd								
	Kegiatan Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung	Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 401.304.600		Rp. 25.000.000	Rp. 401.304.600	
	- Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan di kawasan hutan produksi	120.425,79 ha	110.425,79 ha	110.425,79 ha	48.639,26 ha		110.425,79 ha	48.639,26 ha	
		Jumlah izin wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan produksi	60 izin	60 izin	60 izin	40 izin		60 izin	40 izin	
		Jumlah produksi HHBK di kawasan hutan produksi	3.041,94 ton	3.041,94 ton	3.041,94 ton	1.665,95 ton		3.041,94 ton	1.665,95 ton	
	- Sub kegiatan Pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	12 lokasi	12 lokasi	0 lokasi	0 %	12 lokasi	0 lokasi	
	Kegiatan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara	1.571 ha	1.571 ha	1.571 ha	233 ha		1.571 ha	233 ha	
	- Sub kegiatan pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara	Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	233 ha	233 ha	233 ha	233 ha	100 %	233 ha	233 ha	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Luas pemeliharaan hutan rakyat	233 ha	0 ha	0 ha	0 ha		0 ha	0 ha	
	Kegiatan pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	Persentase jumlah kasus kerusakan kawasan hutan yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	- Sub kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	1.280 orang	424 orang	424 orang	180 orang		424 orang	180 orang	
		Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	30 orang	30 orang	30 orang	180 orang		30 orang	180 orang	
	- Sub kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembuatan kerusakan kawasan hutan	768 kali patroli (48 kali/KPH)	768 kali patroli (48 kali/KPH)	768 kali patroli (48 kali/KPH)	473 kali		768 kali patroli (48 kali/KPH)	473 kali	
		Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	5 unit/KPH	5 unit/KPH	5 unit/KPH	0 unit/KPH	0 %	5 unit/KPH	0 unit/KPH	
	- Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	288 kali	288 kali	288 kali	55 kali		288 kali	55 kali	
		Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan penanganan tindak pidana khusus kehutanan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100 %	1 lokasi	1 lokasi	
	- Sub kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100 %	12 kali	12 kali	
		Jumlah laporan titik api (hotspot) yang dipantau dan dikendalikan	16 laporan	16 laporan	16 laporan	16 laporan	100 %	16 laporan	16 laporan	
	Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6.000 m3/tahun	Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan	28.155,1717 ton	28.155,1717 ton	28.155,1717 ton	39.039,36 m <sup>3</sup>		28.155,1717 ton	39.039,36 m <sup>3</sup>	
	- Sub kegiatan Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan	Jumlah data sebaran GANIS PHPL yang melaksanakan PUHH pada industri	40 orang	40 orang	40 orang	70 orang	100 %	40 orang	70 orang	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	kapasitas produksi < 6.000 m3/tahun									
		Jumlah data pemasaran hasil hutan kayu lokal ekspor	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	100 %	24 laporan	24 laporan	
		Jumlah industri yang dibina dimonitoring dan dievaluasi	60 industri	60 industri	60 industri	25 industri	41 %	60 industri	25 industri	
	Kegiatan Perbenihan tanaman hutan	Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan	95 pemohon	95 pemohon	95 pemohon	20 pemohon	21 %	95 pemohon	20 pemohon	
	- Sub kegiatan sertifikasi sumber benih	Jumlah pemohon sertifikasi sumber benih	36 pemohon	36 pemohon	36 pemohon	18 pemohon	50 %	36 pemohon	18 pemohon	
	- Sub kegiatan mutu benih	Jumlah pemohon sertifikasi mutu bibit	15 pemohon	0 pemohon	0 pemohon	9 pemohon	100 %	0 pemohon	9 pemohon	
	- Sub kegiatan pengawasan peredaran benih dan/atau bibit	Jumlah Ikasi pengawasan peredaran benih dan/atau bibit tanaman hutan	24 kab/kota	24 kab/kota	24 kab/kota	15 kab/kota		24 kab/kota	15 kab/kota	
	Program konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya	Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis		2 jenis	2 jenis	
	Kegiatan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan provinsi	Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	100 penangkar	100 penangkar	100 penangkar	18 penangkar	100 %	100 penangkar	18 penangkar	
	- Sub kegiatan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Jumlah peserta sosialisasi tata cara perizinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	200 orang	200 orang	200 orang	180 orang	90 %	200 orang	180 orang	
		Jumlah laporan monitoring pengendalian dan pengawasan penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	1 laporan	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Persentase jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	16,76 %	15,65 %	15,65 %	24,04 %		15,65 %	24,04 %	
	Kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	60 SDM	60 SDM	60 SDM	180 SDM	100 %	60 SDM	180 SDM	
		Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkatkan kapasitasnya	1.000 orang (50 KTH)	1.000 orang (50 KTH)	1.000 orang (50 KTH)	1.365 orang	100 %	1.000 orang (50 KTH)	1.365 orang	
		Jumlah usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan	50 KTH	50 KTH	50 KTH	67 KTH	100 %	50 KTH	67 KTH	
		Jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	350 KTH	350 KTH	350 KTH	350 KTH	100 %	350 KTH	350 KTH	
	- Sub kegiatan persiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Jumlah peserta sosialisasi/ rapat koordinasi perhutanan sosial	100 orang	100 orang	100 orang	150 orang	100 %	100 orang	150 orang	
		Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktifnya	84 kelompok tani/ KTH	84 kelompok tani/ KTH	84 kelompok tani/ KTH	84 kelompok tani/ KTH	100 %	84 kelompok tani/ KTH	84 kelompok tani/ KTH	
		Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dimonitoring dan dievaluasi	82 kelompok	82 kelompok	82 kelompok	120 kelompok	100 %	82 kelompok	120 kelompok	
		Jumlah peserta temu usaha KUPS	100 orang	100 orang	100 orang	65 orang	100 %	100 orang	65 orang	
		Jumlah laporan konflik tenurial PS yang difasilitasi penyelesaiannya	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %	2 laporan	2 laporan	
		Jumlah produk KUPS yang dipromosikan	10 produk	10 produk	10 produk	10 produk	100 %	10 produk	10 produk	
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah DAS yang direhabilitasi	2 DAS	2 DAS	2 DAS	2 DAS	100 %	2 DAS	2 DAS	
	Kegiatan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan provinsi sulawesi selatan	Jumlah DAS yang dikelola di provinsi sulawesi selatan	2 DAS	2 DAS	2 DAS	2 DAS	100 %	2 DAS	2 DAS	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi									
	- Sub kegiatan penerapan Teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS	Jumlah unit dam penahan	34 unit	34 unit	34 unit	34 unit	100 %	34 unit	34 unit	
		Jumlah unit gully plug	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	100 %	22 unit	22 unit	
		Jumlah unit sumur resapan	10 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 %	0 unit	0 unit	
	Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	100 %	100 %	100 %	95,58 %	95,58 %	100 %	95,58 %	
		Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	98,19 %	98,19 %	100 %	98,19 %	
	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	- Sub kegiatan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	
	- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	
	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	1 dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	- Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji, tunjangan dan TPP	843 orang	843 orang	843 orang	786 orang		843 orang	786 orang	
	- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	1 laporan	
	- Sub kegiatan Pengelolaan dan penyajian bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	1 laporan	
	- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun	2 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	100 %	18 laporan	18 laporan	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	90 %	90 %	90 %	94 %	94 %	90 %	94 %	
	- Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diadakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	1 laporan	
	- Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparat SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 orang	100 orang	100 orang	0 orang	0 %	100 orang	0 orang	
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	10 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	- Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah logistik yang tersedia	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100 %	2 jenis	2 jenis	
	- Sub kegiatan penyelenggaraan rapat konsultansi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100 %	1 tahun	1 tahun	
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terbayarkan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100 %	1 tahun	1 tahun	
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga non PNS	362 orang	362 orang	362 orang	370 orang	100 %	362 orang	370 orang	
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	
		Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan roda 4	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	43 unit	43 unit	43 unit	43 unit	100%	43 unit	43 unit	
		Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4	39 unit	39 unit	39 unit	18 unit	46,15 %	39 unit	18 unit	
		Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2	282 unit	382 unit	382 unit	89 unit	23,29 %	382 unit	89 unit	
	- Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100 %	25 unit	25 unit	



Berdasarkan tabel 2 di atas menggambarkan bahwa capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Hutan

Program pengelolaan hutan mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

- a. Indeks kualitas tutupan lahan
- b. Persentase kontribusi PDRB kehutanan terhadap PDRB Sulsel
- c. Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi
- d. Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya
- e. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Adapun indikator program pengelolaan hutan sebagai berikut :

- a. Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi
- b. Persentase kerusakan hutan per tahun
- c. Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan
- d. Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu

Pencapaian indikator Program Pengelolaan Hutan diuraikan sebagai berikut:

- a. Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi

Luas lahan kritis di Sulawesi Selatan masih terdapat ± 402.430 ha dengan tingkat kekritisannya sangat kritis dan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan menjadi kewenangan provinsi sebagaimana diatur pada UU No. 23 tahun 2014, namun pelaksanaan rehabilitasi lahan tersebut sangat ditentukan partisipatif masyarakat karena sasaran lokasi berada pada tanah milik masyarakat yang bersifat privat, sehingga diperlukan singleritas dan dukungan masyarakat dan pemerintah.

Indikator cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi merupakan salah satu upaya pembentuk tutupan lahan bervegetasi pohon dan akan menjadi faktor pembentuk indeks kualitas tutupan lahan. Luas rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2021 mencapai 13.023 ha terdiri atas 233 ha di luar kawasan hutan dan di dalam kawasan hutan



seluas 12.790 ha. Adapun realisasi cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi tahun 2021 sebesar 65,61 % atau melebihi dari target sebesar 57,91 %.

b. Persentase kerusakan hutan per tahun

Kerusakan hutan masih menjadi perhatian dan fokus pemerintah untuk menurunkan atau meminimalisasi tingkat kerusakannya. Kerusakan hutan di Sulawesi Selatan masih disebabkan oleh kebakaran hutan dan perambahan hutan. Kerusakan hutan akan mempengaruhi fungsi dan kawasan hutan baik secara fisik maupun kimia tanah sehingga berdampak pada produktifitas hutan. Kerusakan kawasan hutan tahun 2021 yang diakibatkan oleh kebakaran hutan seluas 7 ha, perambahan hutan seluas 1.424,29 ha dan pertambangan tanpa izin seluas 0,5 ha. Realisasi indikator persentase kerusakan hutan pertahun sebesar 0,08 % atau melebihi target dari target 17,59 %.

c. Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan

Produksi hasil hutan kayu olahan merupakan penyokong PDRB sektor kehutanan. Realisasi produksi kayu olahan sebesar 134.211,35 m<sup>3</sup> dari target 92.336,62 m<sup>3</sup>. Dengan demikian indikator jumlah produksi hasil hutan kayu melebihi target pada tahun 2021

d. Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu

Produksi hasil hutan bukan kayu juga penyokong PDRB sektor kehutanan. Realisasi produksi hasil hutan bukan kayu sebesar 18.423,14 ton m<sup>3</sup> dari target 283 ton. Dengan demikian indikator jumlah produksi hasil hutan bukan kayu melebihi target pada tahun 2021

2. Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya :

Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

a. Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau satwa liar yang tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata

Adapun indikator Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya adalah jumlah tumbuhan dan satwa liar yang tidak



dilindungi dan/atau satwa liar yang tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata.

Pencapaian Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya melebihi target, dengan realisasi sebesar 14,49 % dari target 10 %. Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau satwa liar yang tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata sebanyak 173 jenis.

Capaian program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya yang melebihi target dipengaruhi karena:

- a. Melakukan identifikasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau satwa liar yang tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi
  - b. Sosialisasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau satwa liar yang tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES
3. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan

Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan didalam dan disekitar kawasan hutan dalam rangka pemberdayaan responsive gender melalui pemberian peluang kerja dan kesempatan berusaha yang berbasis pelestarian sumber daya hutan.

Perhutanan sosial merupakan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan dan menjadi program nasional dengan memberikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam jangka waktu tertentu dengan azas kelestarian dan keberlanjutan hutan. Akses pengelolaan hutan tersebut terdiri dari hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan.



Indikator program Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan yaitu persentase jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan.

Capaian program ini tahun 2021 mencapai 175.802,42 Ha dengan pemegang izin perhutanan sosial sebanyak 426 kelompok, atau sebesar 24,04 % dari target 15,65 %. Dengan demikian capaian program ini melebihi target pada tahun 2021.

Capaian kinerja program perhutanan sosial melebihi target dipengaruhi oleh:

- a. Adanya kelompok kerja percepatan perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tugas menyusun roadmap perhutanan sosial, koordinasi dan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan, fasilitasi pengembangan usaha, pengendalian, monitoring dan evaluasi perhutanan sosial, fasilitasi pembentukan kelompok kerja percepatan perhutanan sosial kabupaten/kota, diseminasi dan informasi perhutanan sosial, fasilitasi dan mediasi konflik tenurial perhutanan sosial. . Kelompok kerja perhutanan sosial terdiri atas pemerintah pusat (BPSKL), pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, lembaga pendidikan tinggi (Universitas Hasanuddin dan Universitas Muhammadiyah), media, yayasan, LSM, Organisasi non Pemerintah
  - b. Keterlibatan penyuluh dan pendamping perhutanan sosial mulai penyiapan perhutanan sosial, pendampingan kelola kelembagaan, pendampingan kelola usaha, pendampingan kelola kawasan kelompok tani.
  - c. Fasilitasi alat usaha ekonomi produktif kepada kelompok tani hutan sebagai upaya pertambahan nilai ekonomi usaha kelompok.
4. Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) mendukung pencapaian sasaran rehabilitasi hutan dan lahan dengan indikator indeks kualitas tutupan lahan.
- Adapun indikator kinerja program Daerah Aliran Sungai (DAS) adaah jumlah DAS yang direhabilitasi.



Capaian program Daerah Aliran Sungai tahun 2021 mencapai 100 % atau jumlah DAS yang direhabilitasi sebanyak 2 DAS dari target 2 DAS. Capaian program ini melalui penerapan teknik konservasi melalui pembuatan bangunan konservasi berupa dam penahan dan gully plug.

Pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah Sulawesi Selatan diantaranya :

1. Kontribusi ekonomi terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

Kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan tergabung pada PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pertumbuhan PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha Sulawesi Selatan pada tahun 2021 memberi kontribusi sebesar 21,80 %

Khusus kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan berdasarkan lapangan usaha memberi kontribusi sebesar 0,06 % pada tahun 2018 dengan nilai PDRB sebesar 289.321,7 milyar dan pada tahun 2019 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 306.553,3 milyar. Pada tahun 2020 sebesar 0,07 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 335.490,00 milyar. Pada tahun 2021 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 315.240 milyar Kontribusi kehutanan tersebut berasal dari produksi hasil hutan kayu olahan dan produksi hasil hutan bukan kayu, dan belum menghitung nilai pemanfaatan jasa lingkungan/ekowisata.

Pencapaian PDRB sektor kehutanan tahun 2021 sebesar 0,06 % dari target 0,07 %, memberi arti bahwa PDRB sektor kehutanan dari penebangan tidak mencapai target dan atau mengalami penurunan kontribusi dari tahun 2020 sebesar 20.249 milyar disebabkan karena produksi hasil hutan yang kurang maksimal akibat adanya pembatasan aktivitas selama pandemic covid 19. Selain itu adanya sektor lain (jasa, telekomunikasi) yang mengalami peningkatan sehingga turut mempengaruhi nilai capaian persentase PDRB kehutanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan

2. Rehabilitasi hutan dan lahan

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya perbaikan daya dukung lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Rehabilitasi hutan dan lahan memberi kontribusi



terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Salah satu unsur IKLH adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang menjadi sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai IKTL provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 54,94, tahun 2019 sebesar 58,06, tahun 2020 sebesar 55,10 dan tahun 2021 sebesar 55,40.

Kualitas tutupan lahan yang baik ditandai adanya mayoritas luasan tutupan lahan vegetasi pada suatu daerah. Kondisi tutupan lahan sangat tergantung pada upaya rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis dan langkah preventif perusakan kawasan hutan dan hasil hutan.

### 3. Kerusakan kawasan hutan

Pengendalian kerusakan kawasan hutan dan lahan adalah upaya perlindungan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Perlindungan kawasan hutan dari kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan, perambahan hutan, illegal logging.

### 4. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

Masyarakat sekitar hutan masih bergantung pada potensi hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Berbagai jenis usaha kelola kawasan memungkinkan dikembangkan seperti pengolahan aren, kopi, dan madu. Masyarakat sekitar hutan tergabung secara berkelompok dengan membuat kelompok tani hutan dalam menjalankan kelola usaha dan kelola kawasan secara legal melalui perhutanan sosial. Perkembangan izin perhutanan sosial terus mengalami peningkatan, dan ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial masih diminati masyarakat sekitar hutan karena memberikan akses legal dalam mengelola hutan tanpa ada kekhawatiran lagi.

Izin pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial pada tahun 2018 seluas 52.529,22 ha, tahun 2019 seluas 80.425,79 ha, tahun 2020 seluas 161.133,22 ha, tahun 2021 seluas 175.802,42 ha.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang indikator kinerja kunci outcome Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:



1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial
2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)
3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi



Tabel TC\_30

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		%	15,65	16,25	16,76	16,76	15,80	24,04	16,76	16,76	
2	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)		%	17,59	16,20	14,82	14,82	0,70	0,08	14,82	14,82	
3	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi		%	57,91	61,60	65,47	65,47	38,19	65,61	65,47	65,47	
4	Kontribusi kehutanan terhadap PDRB		%	0,07	0,09	0,08	0,08	0,06	0,06	0,08	0,08	
5	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan		%	75,67	75,67	75,67	75,67	75,67	75,67	75,67	75,67	



Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) outcome sesuai table diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial

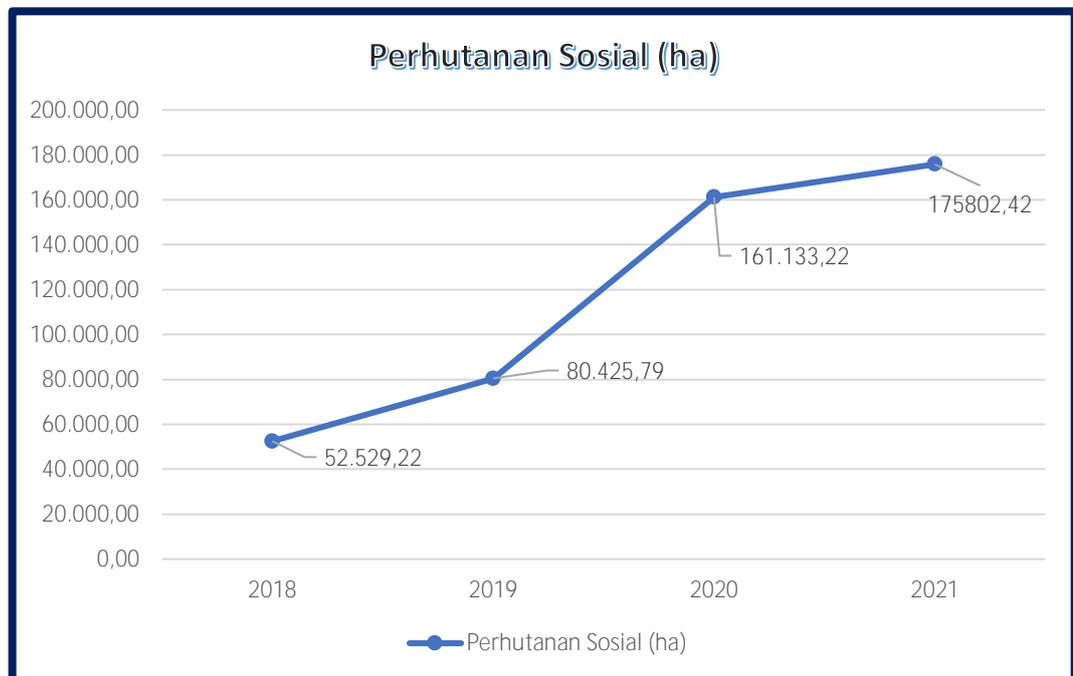
Perhutanan sosial menjadi suatu solusi dan tantangan pembangunan sektor kehutanan. Keadaan ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan stakeholder lainnya. Perhutanan sosial menjadi solusi karena masyarakat dan lembaga desa diberi akses legal pengelolaan hutan dalam jangka waktu tertentu. Dengan akses legal tersebut masyarakat dapat mengelola kawasan hutan dengan mempertimbangkan potensi hutan tersebut, dengan harapan mampu mendorong perekonomian mikro bagi masyarakat.

Pencapaian pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial sampai dengan tahun 2021 mencapai 175.802,42 ha atau 9,88 % dari luas hutan lindung dan hutan produksi seluas 1.780.029 ha.

Perkembangan perhutanan sosial dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram 1

Perkembangan perhutanan sosial 2021



Akses legal pengelolaan hutan dilaksanakan dalam bentuk skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan



Kulin KK, yang dikelola oleh kelompok tani hutan berjumlah 400 kelompok tani atau 19,75 % dari total usulan KTH yang terintegrasi.

Diagram 2

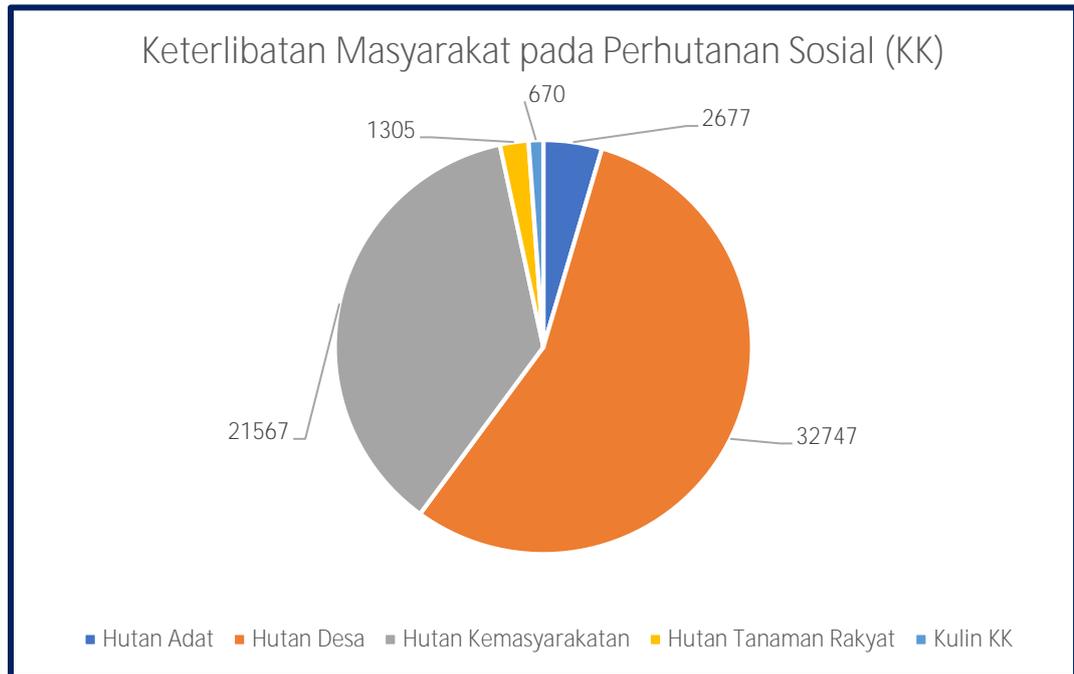
Kelompok Tani Hutan Tahun 2021



Perkembangan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini memberi gambaran masyarakat memafaatkan akses mengelola hutan semakin besar dan secava legal, yang tentunya partisipasi aktif ini diperlukan pembinaan dan pengendalian, serta peningkatan usaha masyarakat sehingga dapat memberi dampak peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui perhutanan sosial menjadi salah satu solusi penyelesaian sengketa tenurial lahan hutan yang selama ini menjadi persoalan pembangunan kehutanan. Pada tahun 2021 jumlah KK yang terlibat dalam perhutanan sosial mencapai 58.966 KK mencakup luas garapan seluas 175.802 ha.



Diagram 3  
Pelibatan Masyarakat pada Perhutanan Sosial Tahun 2021

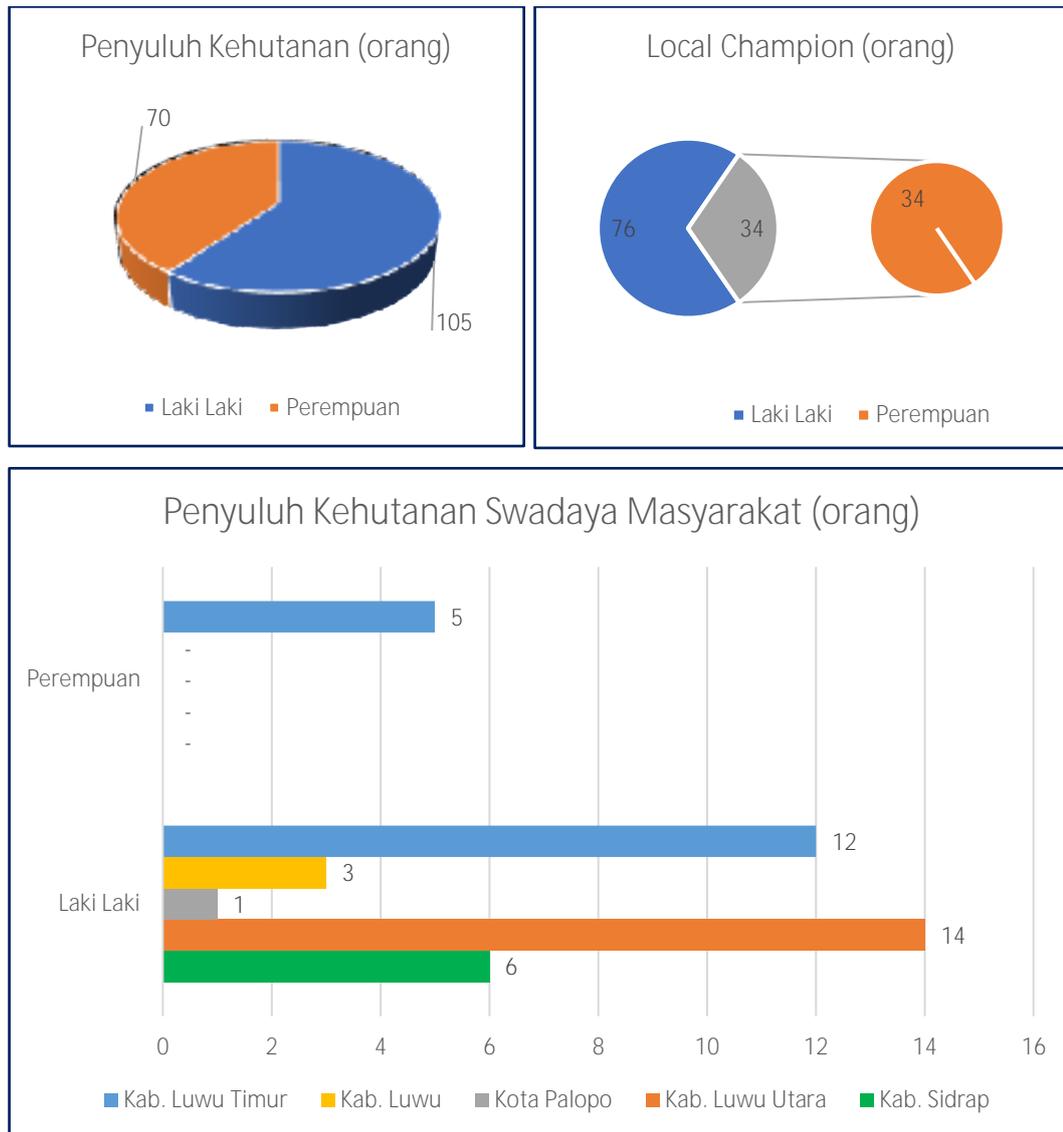


Keterlibatan masyarakat tersebut diatas melakukan kelola kawasan, kelola usaha dan kelola kelembagaan sangat ditentukan dari pelibatan tenaga penyuluh kehutanan, local champion PS dan PKSM. Pelibatangnya berperan dalam pendampingan dan penyuluhan untuk peningkatan mutu dan akses pasar yang lebih luas. Jumlah tenaga penyuluh kehutanan masih sangat terbatas jika dibanding dengn jumlah kelompok dan aksesibilitas lokasi, sehingga pendampingan kelompok dibantu oleh tenaga local champion, dan PKSM. Adapun tenaga penyuluh, local champion dan PKSM sebagai berikut :



Diagram 4

Penyuluh Kehutanan, Local Champion, PKSM Tahun 2021



Berdasarkan diagram di atas, menunjukkan bahwa peran laki-laki lebih dominan dibanding perempuan dalam melakukan pendampingan, penyuluhan kepada kelompok tani. Komposisi gender tenaga penyuluh kehutanan laki laki mencapai 60 % dan perempuan 40 %, komposisi gender local champion laki laki mencapai 69 % dan perempuan 31 %, komposisi gender penyuluh kehutanan swadaya masyarakat laki laki mencapai 88 % dan perempuan 12 %.

Dengan demikian prinsip akses, partisipasi, control dan manfaat pendampingan dan penyuluhan telah memberikan keadilan dan kesetaraan gender laki-laki dan perempuan dalam upaya mengembangkan mutu dan akses pasar produk hasil hutan.

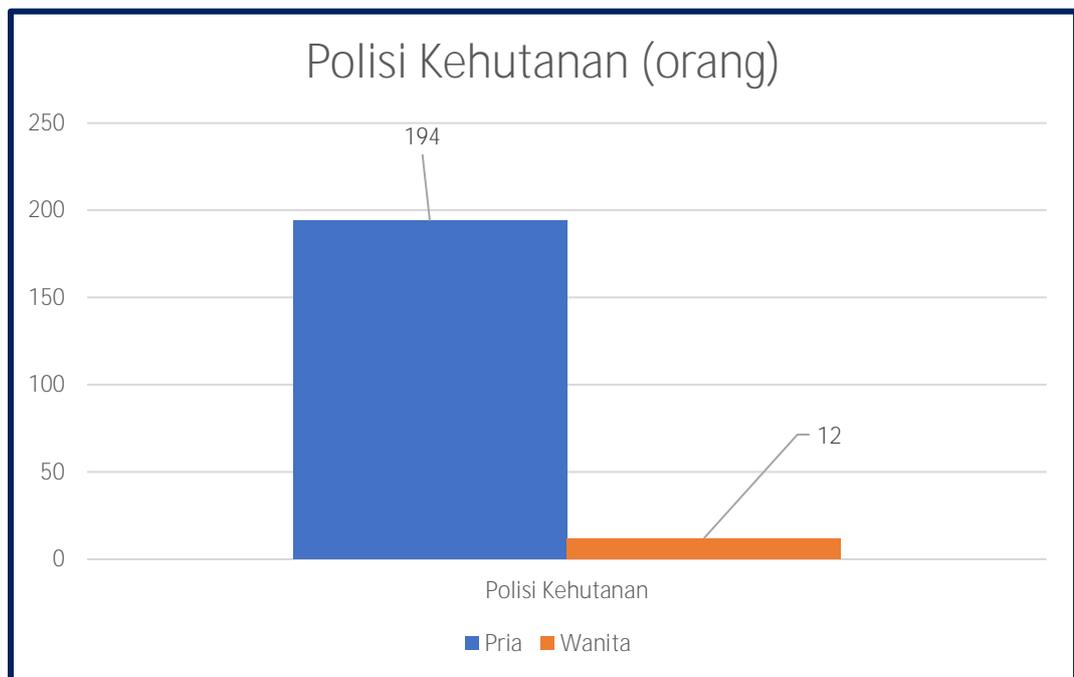


2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi).

Kerusakan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan pembangunan kehutanan. Aktivitas masyarakat sekitar hutan menjadi potensi terjadinya kerusakan hutan, sebagian besar masyarakat memanfaatkan hutan sebagai lahan budidaya tanaman semusim yang memiliki masa panen singkat. Upaya perlindungan dan pengamanan hutan dari kerusakan hutan terus dilakukan dengan pendekatan persuasif sehingga diharapkan adanya kesadaran untuk menjaga ekosistem hutan yang ada. Upaya preventif perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan secara rutin oleh polisi kehutanan dengan melakukan patroli pengamanan hutan sekaligus memberikan edukasi, sosialisasi batas-batas kawasan hutan.

Pengarusutamaan gender dalam aktivitas patroli pengamanan hutan melibatkan polisi kehutanan pria dan polisi kehutanan wanita, dengan tugas melakukan pengendalian, pembatasan kerusakan hutan. Jumlah polisi kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 berjumlah 206 orang dengan rincian sebagai berikut :

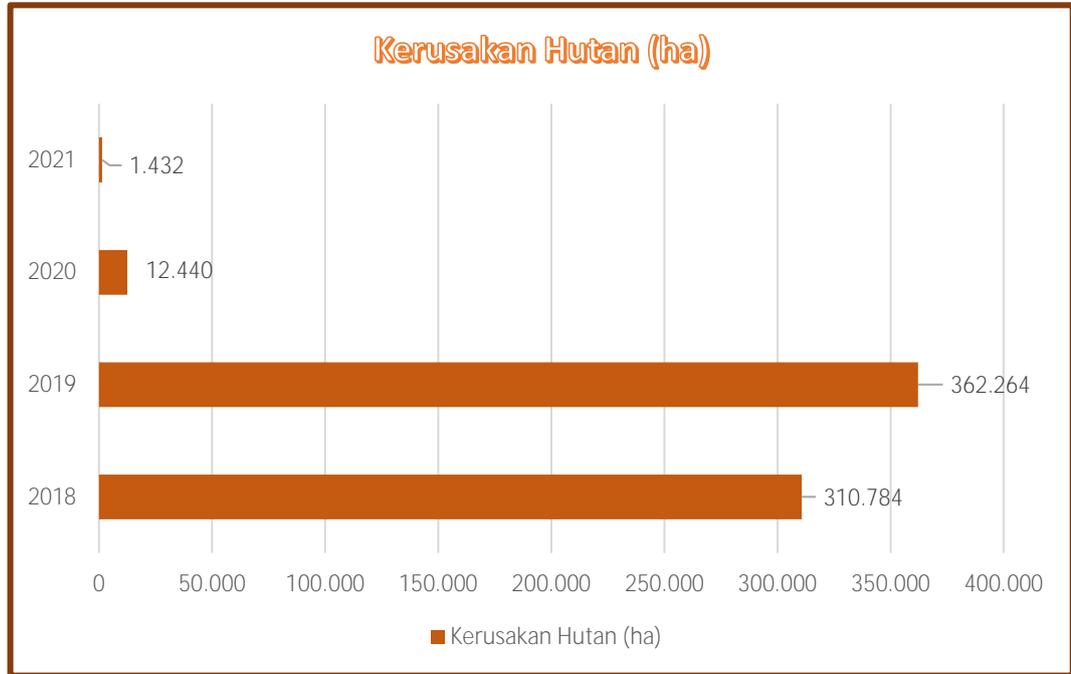
Diagram 5  
Polisi Kehutanan Tahun 2021





Kejadian kerusakan hutan disebabkan pemanfaatan hutan tanpa izin (perambahan hutan), kebakaran hutan dan illegal logging, dengan perkembangan kerusakan hutan disajikan pada diagram berikut :

Diagram 6  
Kerusakan Kawasan Hutan



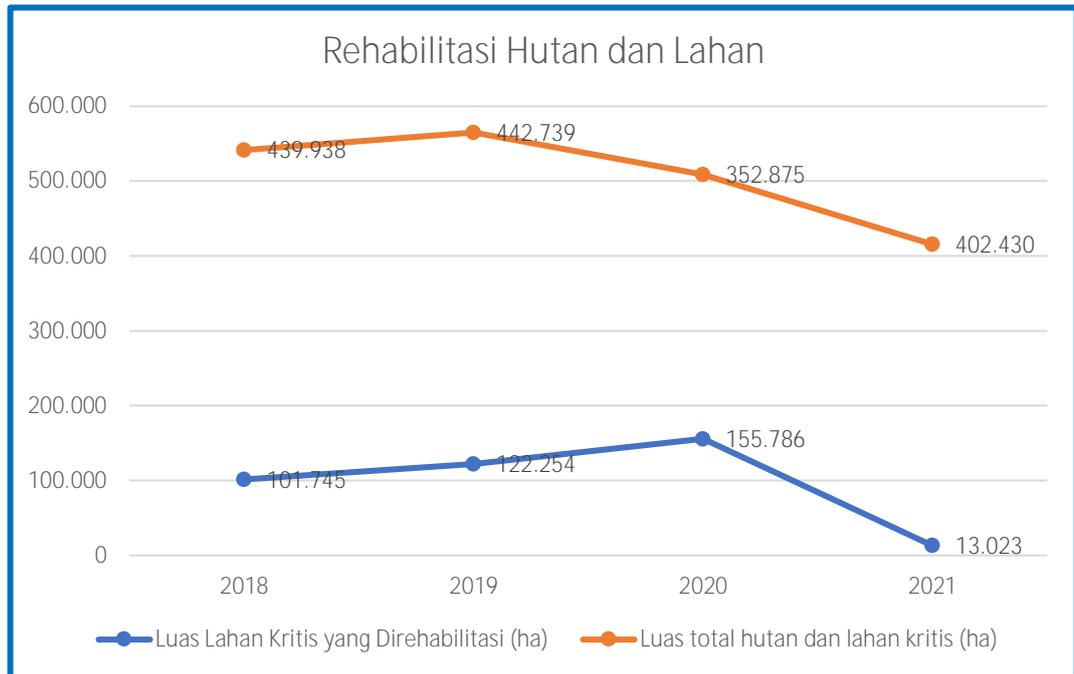
Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa, kerusakan hutan mengalami penurunan menjadi 1.432 ha. Penurunan ini disebabkan tahun 2019 luas lahan kritis masih menjadi bagian penghitungan kerusakan hutan, yang semestinya menjadi bagian penghitungan luas lahan kritis yang direhabilitasi.

3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi

Lahan kritis menjadi prioritas pembangunan kehutanan, dengan luas lahan kritis mencapai 352.874,59 ha pada tahun 2020. Salah satu strategi penanganan lahan kritis melalui pelibatan semua stakeholder untuk melakukan penanaman. Perkembangan rehabilitasi hutan dan lahan disajikan sebagai berikut :



Diagram 7  
Rehabilitasi Hutan dan Lahan



4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Hutan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, tetapi hanya sebagian kecil dari sumber daya hutan yang berkontribusi secara riil terhadap penerimaan negara dan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pencapaian Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ketahun mengalami penurunan, dimana capaian pada tahun 2018 sebesar 0,06 persen, tahun 2019 tetap 0,06 persen, pada tahun 2020 sebesar 0,06 dan tahun 2021 triwlual III sebesar 0,6 %. Secara persentase menunjukkan kecilnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan, namun secara nilai terus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun.

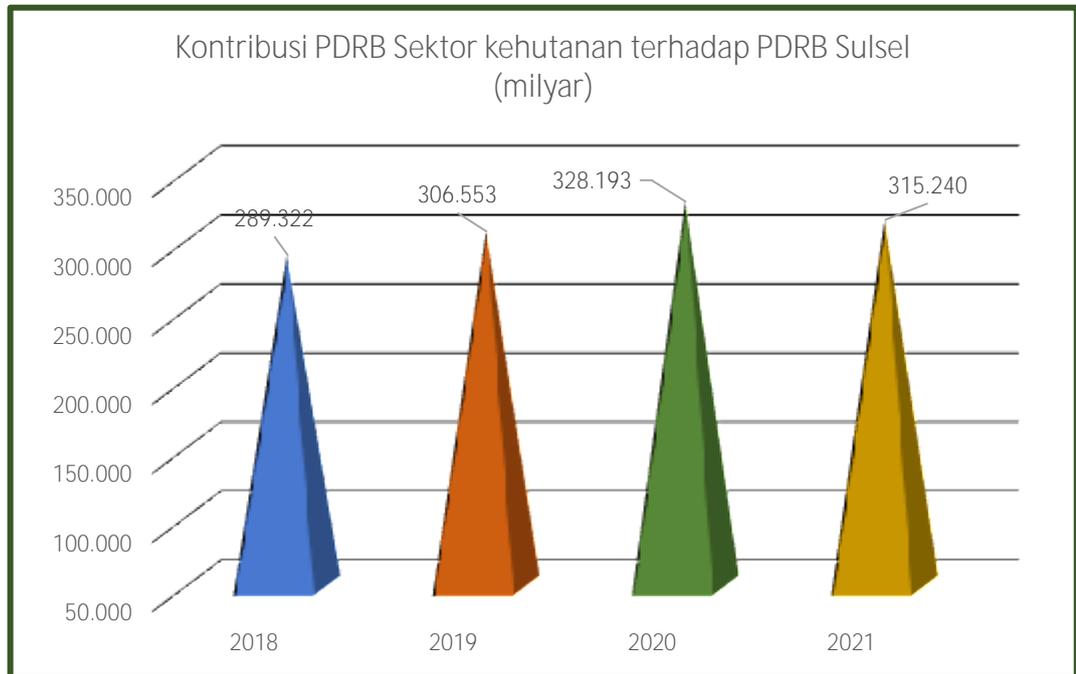
Kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan berdasarkan lapangan usaha memberi kontribusi sebesar 0,06 % pada tahun 2018 dengan nilai PDRB sebesar 289.321,7 milyar dan pada tahun 2019 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 306.553,3 milyar. Pada tahun 2020 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 328.192,82 milyar. Pada tahun 2021 triwulan III sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 315.240 milyar Kontribusi kehutanan tersebut berasal dari



produksi hasil hutan kayu olahan dan produksi hasil hutan bukan kayu, dan belum menghitung nilai pemanfaatan jasa lingkungan/ekowisata.

Diagram 8

Kontribusi PDRB Sektor Kehutanan

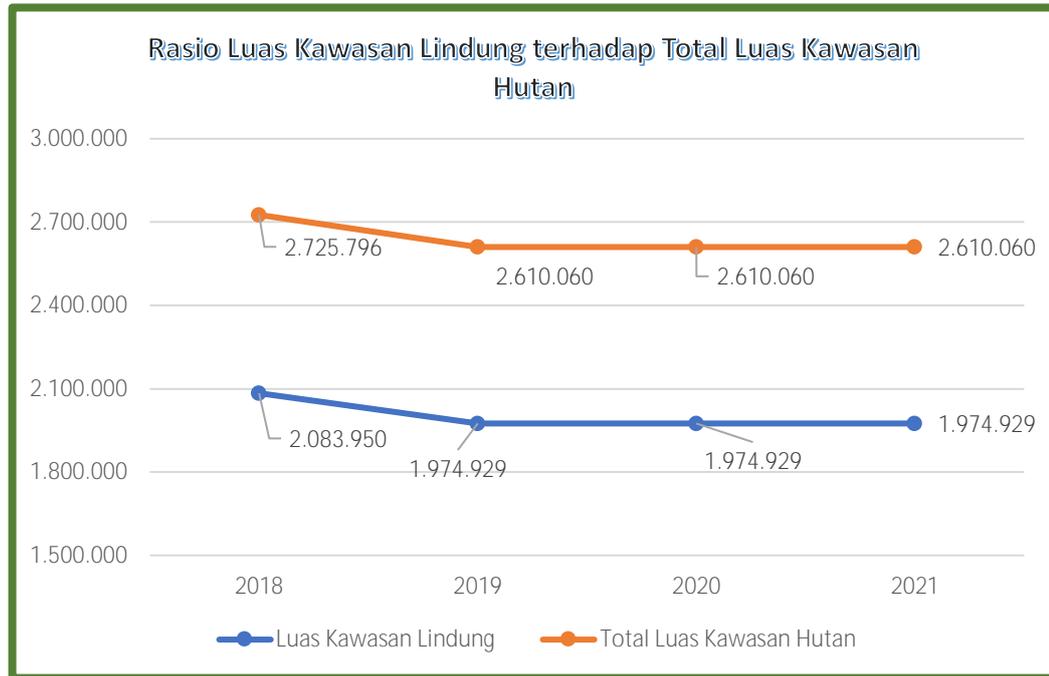


5. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan  
Bila melihat rasio luas kawasan lindung terhadap total Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2015 sampai tahun 2019, menunjukkan bahwa rasio luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan di Sulawesi Selatan pada periode sebelumnya (2015-2018) sebesar 76,45 persen menurun menjadi 75,66 persen pada tahun 2020.



Diagram 9

Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan

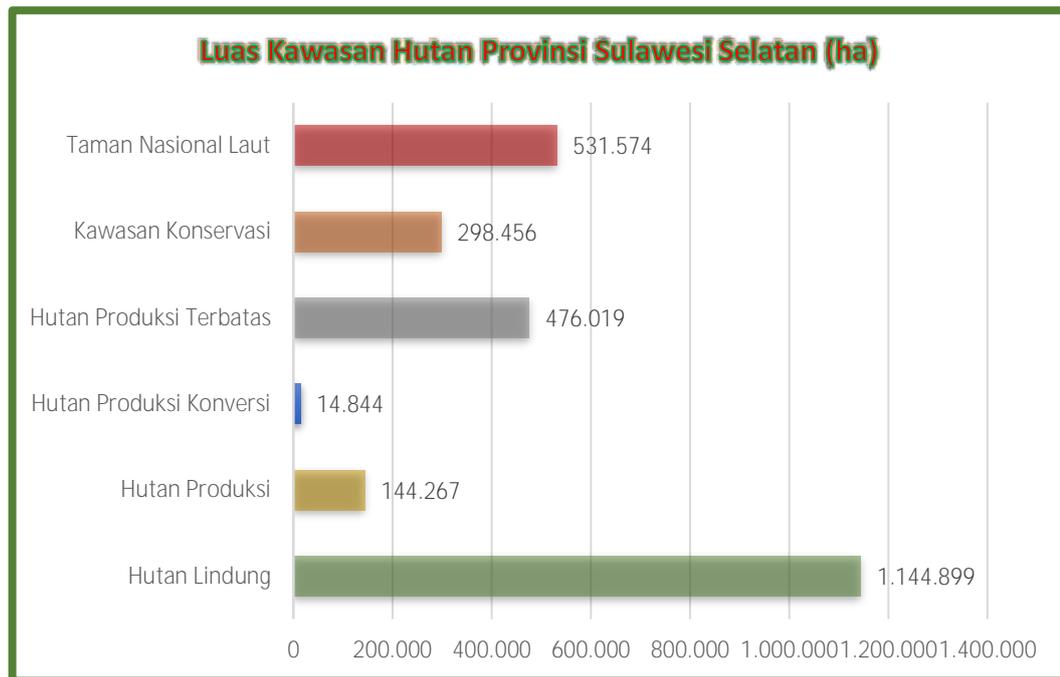


Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan tahun 2020 mencapai 75,66 %, merupakan luas rasio luas kawasan hutan lindung dan Kawasan pelestarian alam (hutan suaka alam, cagar alam) terhadap luas Kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 362/MenLHK/setjen/PLA.0/5/2019 bahwa luas kawasan hutan di provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.610.060 ha, tersaji pada diagram berikut :



Diagram 10

Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan



2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah  
Isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung diperuntukkan untuk hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan akan memberi dampak pada ekonomi daerah namun harus tetap memperhatikan asas kelestarian dan keberlanjutan. Potensi kawasan hutan cukup beragam mulai pengembangan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan/ekowisata, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena membutuhkan dukungan berbagai pihak.

2. Adanya kerusakan wilayah DAS

Di provinsi Sulawesi Selatan terdapat DAS lintas provinsi, DAS lintas kabupaten, dan DAS dalam Kabupaten. Kondisinya terdapat DAS yang perlu dipertahankan dan DAS yang perlu dipulihkan. Salah satu DAS lintas provinsi yang memerlukan pemulihan yaitu DAS Saddang dan salah



satu DAS lintas kabupaten yang perlu dipulihkan yaitu DAS Jeneberang seluas 78.883,90 ha.

3. Masih adanya kasus illegal logging
4. Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan  
Salah satu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan yaitu melalui perhutanan sosial dengan skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kulin KK. Keikutsertaan masyarakat masih relatif rendah.

Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6394/MENLHK-PKTL/REN/PLA.O/7/2019 Tanggal 23 juli 2019 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi IV, dengan target seluas 242.613 Ha, maka persentase capaian luasan perhutanan sosial sebesar 33,14 % dari target yang ditetapkan.

Permasalahan yang masih menjadi tantangan di sektor kehutanan antara lain :

1. Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Masih terdapatnya konflik kepemilikan dan pemanfaatan kawasan hutan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
3. Masih terdapatnya lahan kritis dan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
4. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan belum optimal, utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dengan memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah. maka kebutuhan rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :



Tabel TC-31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	65,47 %	Rp. 13.935.525.020	Program Pengelolaan Hutan		Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	65,47 %	Rp. 13.935.525.020	
			Persentase kerusakan hutan	14,80 %				Persentase kerusakan hutan	14,80 %		
			Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	92.336,62 m <sup>3</sup>				Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	92.336,62 m <sup>3</sup>		
			Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 ton				Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 ton		
1	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi		Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	1.780.029 ha	Rp. 788.716.120	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi		Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	1.780.029 ha	Rp. 788.716.120	
a	Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH	Bone, Jeneponto Luwu, Lutra, Sinjai Wajo Lutim	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun	1 dokumen	Rp. 190.000.000	Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH	Bone, Jeneponto Luwu, Lutra, Sinjai Wajo Lutim	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun	1 dokumen	Rp. 190.000.000	
b	Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH	Bantaeng, Barru, Bone Gowa Enrekang Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja, Lutim Torut	Jumlah unit kesatuan pengelolaan hutan produksi/lindung yang telah dilakukan pembagian blok	16 unit	Rp. 423.164.220	Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH	Bantaeng, Barru, Bone Gowa Enrekang Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja, Lutim Torut	Jumlah unit kesatuan pengelolaan hutan produksi/lindung yang telah dilakukan pembagian blok	16 unit	Rp. 423.164.220	
c	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Bantaeng Barru, Bone Gowa Enrekang Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja,	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi resort dan kantor resort kesatuan pengelolaan hutan yang terbangun	10 unit	Rp. 100.000.000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Bantaeng Barru, Bone Gowa Enrekang Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja,	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi resort dan kantor resort kesatuan pengelolaan hutan yang terbangun	10 unit	Rp. 100.000.000	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Lutim Torut					Lutim Torut				
d	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Makassar	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi	1 dokumen	Rp. 75.551.900	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Makassar	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi	1 dokumen	Rp. 75.551.900	
2	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen Rencanan Pengelolaan KPH yang tersusun	24 dokumen	Rp. 190.000.000	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen Rencanan Pengelolaan KPH	24 dokumen	Rp. 190.000.000	
a	Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Sulsel	Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan	24 dokumen	Rp. 190.000.000	Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Sulsel	Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan	24 dokumen	Rp. 190.000.000	
3	Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan	Rp. 25.000.000	Rp. 587.671.000	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan	Rp. 25.000.000	Rp. 587.671.000	
a	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Bone Gowa Maros	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 dokumen	Rp. 78.146.000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Bone Gowa Maros	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 dokumen	Rp. 78.146.000	
b	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Bantaeng Barru, Enrekang Luwu Lutra Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	10 dokumen	Rp. 49.890.000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Bantaeng Barru, Enrekang Luwu Lutra Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	10 dokumen	Rp. 49.890.000	
c	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Makassar	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	10 dokumen	Rp. 49.620.000	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Makassar	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	10 dokumen	Rp. 49.620.000	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Bone Gowa Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	Rp. 60.420.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Bone Gowa Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	Rp. 60.420.000	
e	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Bantaeng Barru Enrekang Luwu Lutra Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Totur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	10 dokumen		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Bantaeng Barru Enrekang Luwu Lutra Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Totur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	10 dokumen		
f	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Bantaeng Bone Barru Bulukumba Enrekang Gowa Jeneponto Luwu Luwu Utara Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Takalar Tana Toraja Wajo Palopo Lutim Torut	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	4 dokumen	Rp. 49.594.400	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Bantaeng Bone Barru Bulukumba Enrekang Gowa Jeneponto Luwu Luwu Utara Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Takalar Tana Toraja Wajo Palopo Lutim Torut	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	4 dokumen	Rp. 49.594.400	
g	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Bantaeng Barru Enrekang Luwu Lutra Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	10 dokumen		Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Bantaeng Barru Enrekang Luwu Lutra Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	10 dokumen		
h	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra	Jumlah Lokasi Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan kayu	2 lokasi	Rp. 300.000.000	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra	Jumlah Lokasi Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan kayu	2 lokasi	Rp. 300.000.000	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lingkungan	Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	dan/atau Jasa Lingkungan			Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	dan/atau Jasa Lingkungan			
4	Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara		Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara	1.571 ha	Rp. 9.599.920.300	Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara		Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara	1.571 ha	Rp. 9.599.920.300	
a	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 dokumen	Rp. 122.383.400	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 dokumen	Rp. 122.383.400	
b	Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	450 ha	Rp. 3.267.363.800	Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	450 ha	Rp. 3.267.363.800	
c	Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 ha	Rp. 676.800.000	Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 ha	Rp. 676.800.000	
d	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan.	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	150 unit	Rp. 4.328.711.600	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan.	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	150 unit	Rp. 4.328.711.600	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Lutim Torut					Lutim Torut				
e	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	Jumlah Bibit yang dihasilkan untuk Rehabilitasi Lahan	25.000 btg	Rp. 684.564.500	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	Jumlah Bibit yang dihasilkan untuk Rehabilitasi Lahan	25.000 btg	Rp. 684.564.500	
f	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Bantaeng, Barru Bone, Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana toraja Lutim Toraja Utara	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan rehabilitasi lahan	1 laporan	Rp. 68.303.400	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Bantaeng, Barru Bone, Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana toraja Lutim Toraja Utara	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan rehabilitasi lahan	1 laporan	Rp. 68.303.400	
g	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Bantaeng Barru Bone Bulukumba Jeneponto Luwu Lutra Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Takalar Wajo Palopo Luwu	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	20 ha	Rp. 451.793.600	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Bantaeng Barru Bone Bulukumba Jeneponto Luwu Lutra Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Takalar Wajo Palopo Luwu	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	20 ha	Rp. 451.793.600	
5	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Jumlah Kasus Kerusakan Kawasan hutan yang tertangani	100 %	Rp. 1.899.532.000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Jumlah Kasus Kerusakan Kawasan hutan yang tertangani	100 %	Rp. 1.899.532.000	
a	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1.780.029 ha	Rp. 1.377.612.000	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1.780.029 ha	Rp. 1.377.612.000	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut					Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut				
b	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Luwu Torut	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1.780.029 ha	Rp. 217.850.000	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Luwu Torut	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1.780.029 ha	Rp. 217.850.000	
c	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	2 operasi	Rp. 109.920.000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	2 operasi	Rp. 109.920.000	
d	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Sulsel	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 dokumen	Rp. 119.470.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Sulsel	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 dokumen	Rp. 119.470.000	
e	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan	Sulsel	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan	Rp. 74.680.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan	Sulsel	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan	Rp. 74.680.000	
6	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jenis HHBK yang diolah oleh pemegang izin	3 jenis	Rp. 67.009.200	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jenis HHBK yang diolah oleh pemegang izin	3 jenis	Rp. 67.009.200	
a	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Sulsel	Jumlah Unit Managemen Pengolahan Bahan Baku	15 unit		Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Sulsel	Jumlah Unit Managemen Pengolahan Bahan Baku	15 unit		



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sulsel	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	5 unit manajemen		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sulsel	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	5 unit manajemen		
c	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Sulsel	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	15 unit manajemen		Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Sulsel	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	15 unit manajemen		
d	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Sulsel	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	3 unit manajemen	Rp. 67.009.200	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Sulsel	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	3 unit manajemen	Rp. 67.009.200	
7	Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun		Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu	28.155,1717 ton	Rp. 127.080.000	Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun		Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu	28.155,1717 ton	Rp. 127.080.000	
a	Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun	Sulsel	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	30 unit manajemen	Rp. 66.890.000	Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun	Sulsel	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	30 unit manajemen	Rp. 66.890.000	
b	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Sulsel	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	30 dokumen	Rp. 60.190.000	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Sulsel	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	30 dokumen	Rp. 60.190.000	
c	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6.000 m3/ tahun melalui system pelayanan perizinan berusaha teritegrasi secara elektronik	Sulsel	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	12 unit manajemen		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6.000 m3/ tahun melalui system pelayanan perizinan berusaha teritegrasi secara elektronik	Sulsel	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	12 unit manajemen		



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan		Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan	95 pemohon	Rp. 675.596.400	Perbenihan Tanaman Hutan		Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan	95 pemohon	Rp. 675.596.400	
a	Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar	Bantaeng Bone Bulukumba Gowa Jeneponto Luwu Maros Pangkep Pinrang Selayar Sinjai Soppeng Takalar Torut Luwu Jeneponto Maros Pinrang Selayar Tana Toraja Torut	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	14 unit usaha	Rp. 99.980.000	Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar	Bantaeng Bone Bulukumba Gowa Jeneponto Luwu Maros Pangkep Pinrang Selayar Sinjai Soppeng Takalar Torut Luwu Jeneponto Maros Pinrang Selayar Tana Toraja Torut	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	14 unit usaha	Rp. 99.980.000	
b	Sertifikasi sumber benih	Jeneponto Luwu Maros Pinrang Selayar Tana Toraja Torut	Jumlah sertifikasi sumber benih yang diterbitkan	7 sertifikat	Rp. 49.930.000	Sertifikasi sumber benih	Jeneponto Luwu Maros Pinrang Selayar Tana Toraja Torut	Jumlah pemohon sertifikasi sumber benih	30 pemohon	Rp. 49.930.000	
c	Sertifikasi mutu benih	Gowa Maros Jeneponto Pinrang Selayar Soppeng Tana Toraja Torut	Jumlah Sertifikat mutu Benih yang Diterbitkan	3 sertifikat	Rp. 49.930.000	Sertifikasi mutu benih	Gowa Maros Jeneponto Pinrang Selayar Soppeng Tana Toraja Torut	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	7 sertifikat	Rp. 49.930.000	
d	Sertifikasi mutu bibit	Gowa Jeneponto Maros Pinrang Selayar Soppeng Tana Toraja Torut	Jumlah Sertifikat Mutu bibit yang Diterbitkan	7 sertifikat	Rp. 49.930.000	Sertifikasi mutu bibit	Gowa Jeneponto Maros Pinrang Selayar Soppeng Tana Toraja Torut	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	3 sertifikat	Rp. 49.930.000	
e	Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit	Bantaeng Bone Bulukumba Gowa Jeneponto Luwu Maros	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	14 laporan	Rp. 99.980.000	Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit	Bantaeng Bone Bulukumba Gowa Jeneponto Luwu Maros	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	14 laporan	Rp. 99.980.000	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pangkep Pinrang Selayar sinjai Soppeng Takalar Torut					Pangkep Pinrang Selayar sinjai Soppeng Takalar Torut				
f	Pembangunan Sumber Benih	SElayar	Luas Sumber Benih yang Dibangun	5 ha	Rp. 325.846.400	Pembangunan Sumber Benih	SElayar	Luas Sumber Benih yang Dibangun	5 ha	Rp. 325.846.400	
B.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA		Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	2 jenis	Rp. 83.011.800	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA		Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	2 jenis	Rp. 83.011.800	
1	Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	100 penangkar	Rp. 83.011.800	Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	100 penangkar	Rp. 83.011.800	
a	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 laporan	Rp. 83.011.800	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 laporan	Rp. 83.011.800	
C	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	16,78 %	Rp. 10.284.262.300	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	16,78 %	Rp. 10.284.262.300	
1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan		Jumlah SDM bidang kehutanan yang	60 sdm	Rp. 10.284.262.300	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan		Jumlah SDM bidang kehutanan yang	60 sdm	Rp. 10.284.262.300	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		ditingkatkan kapasitasnya			Masyarakat di Bidang Kehutanan		ditingkatkan kapasitasnya			
			Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya	60 orang				Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya	1.000 orang (50 KTH)		
a	Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Lutra Maros Pinrang Sidrap sinjai Soppeng Tana Toraja Parepare Palopo Lutim	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	200 orang	Rp. 192.063.300	Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Lutra Maros Pinrang Sidrap sinjai Soppeng Tana Toraja Parepare Palopo Lutim	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	200 orang	Rp. 192.063.300	
b	Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	169 KTH	Rp. 196.263.600	Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	169 KTH	Rp. 196.263.600	
c	Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa Jeneponto Luwu Lutra Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Takalar Tana Toraja Wajo Parepare Palopo Lutim Torut	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2.000 ha	Rp. 9.895.935.400	Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa Jeneponto Luwu Lutra Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Takalar Tana Toraja Wajo Parepare Palopo Lutim Torut	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2.000 ha	Rp. 9.895.935.400	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
D	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Jumlah DAS yang direhabilitasi	2 DAS	Rp. 331.423.100	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Jumlah DAS yang direhabilitasi	2 DAS	Rp. 331.423.100			
1	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah DAS direhabilitasi	2 DAS	Rp. 331.423.100	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah DAS yang dikelola di Provinsi Sulawesi Selatan	2 DAS	Rp. 331.423.100			
a	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 dokumen	Rp. 75.000.000	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	2 dokumen	Rp. 75.000.000			
b	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Makassar	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 dokumen	Rp. 82.198.500	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Makassar	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	2 DAS	Rp. 82.198.500			
c	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	450 orang		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	250 orang				
d	Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 lembaga	Rp. 92.802.000	Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	4 kali	Rp. 92.802.000			
e	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS yang dihasilkan	1 tahun	Rp. 81.422.600	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS yang dihasilkan	1 tahun	Rp. 81.422.600			
E	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	Rp. 114.538.025.362	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	Rp. 114.538.025.362			
			Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %					Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		100 %		
			Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)	100 %					Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)		100 %		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	Rp. 1.417.624.500	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	Rp. 1.417.624.500			



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Rp. 779.898.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Rp. 779.898.600	
b	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Rp. 92.796.600	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Rp. 92.796.600	
c	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Rp. 85.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Rp. 85.000.000	
d	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Rp. 94.093.200	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Rp. 94.093.200	
e	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Rp. 84.999.900	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Rp. 84.999.900	
f	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	Rp. 90.974.400	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	Rp. 90.974.400	
g	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Rp. 189.861.800	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Makassar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	Rp. 189.861.800	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	Rp. 93.701.917.694	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	Rp. 93.701.917.694	
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	768 orang/bulan	Rp. 93.302.054.394	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	768 orang/bulan	Rp. 93.302.054.394	
b	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	Rp. 9.999.800	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	Rp. 9.999.800	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5000 dokumen	Rp. 9.999.900	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5000 dokumen	Rp. 9.999.900	
d	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 laporan	Rp. 74.937.000	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 laporan	Rp. 74.937.000	
e	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Rp. 94.977.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Rp. 94.977.000	
f	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 laporan	Rp. 129.999.800	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 laporan	Rp. 129.999.800	
g	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	14 laporan	Rp. 74.949.800	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	14 laporan	Rp. 74.949.800	
h	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	Rp. 5.000.000	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	Rp. 5.000.000	
3	Kegiatan Administarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Jumlah Penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	2 dokumen	Rp. 118.582.400	Kegiatan Administarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Jumlah Penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	2 dokumen	Rp. 118.582.400	
a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen		
b	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 dokumen	Rp. 50.124.200	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 dokumen	Rp. 50.124.200	
c	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	Rp. 59.084.200	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	Rp. 59.084.200	
d	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	24 laporan		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	24 laporan		



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
e	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	Rp. 4.637.000	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	Rp. 4.637.000	
f	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 laporan	Rp. 4.737.000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 laporan	Rp. 4.737.000	
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Rp. 1.712.430.000	Rp. 68.303.400	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Rp. 1.712.430.000	Rp. 68.303.400	
a	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan		Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan		
b	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	16 laporan	Rp. 68.303.400	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	16 laporan	Rp. 68.303.400	
d	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 laporan		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 laporan		
e	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Makassar	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan		Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Makassar	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan		
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	90	Rp. 874.771.800	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	90	Rp. 874.771.800	
a	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 unit		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 unit		
b	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1.150 paket	Rp. 441.850.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1.150 paket	Rp. 441.850.000	
c	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	Rp. 72.310.000	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	Rp. 72.310.000	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian	24 dokumen		Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian	24 dokumen		
e	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Makassar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	Rp. 60.611.800	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Makassar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	Rp. 60.611.800	
f	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 orang	Rp. 200.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 orang	Rp. 200.000.000	
g	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	120 orang		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	120 orang		
h	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	120 orang	Rp. 100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	120 orang	Rp. 100.000.000	
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	Rp. 2.397.920.400	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	Rp. 2.397.920.400	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26 paket	Rp. 62.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26 paket	Rp. 62.000.000	
b	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 paket	Rp. 70.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 paket	Rp. 70.000.000	
c	Penyediaan peralatan rumah tangga	Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 paket	Rp. 60.001.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 paket	Rp. 60.001.000	
d	Penyediaan bahan logistik kantor	Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 paket	Rp. 351.652.200	Penyediaan bahan logistik kantor	Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 paket	Rp. 351.652.200	
e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	26 jenis	Rp. 168.720.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	26 jenis	Rp. 168.720.000	
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Makassar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan	4 dokumen	Rp. 20.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Makassar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan	4 dokumen	Rp. 20.000.000	



## RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
g	Penyediaan bahan/material	Makassar	Jumlah paket/material yang disediakan	1 paket	Rp. 9.999.800	Penyediaan bahan/material	Makassar	Jumlah paket/material yang disediakan	1 paket	Rp. 9.999.800	
h	Fasilitas kunjungan tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp. 46.280.000	Fasilitas kunjungan tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp. 46.280.000	
i	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	Rp. 1.511.613.600	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	Rp. 1.511.613.600	
j	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14 dokumen	Rp. 47.653.800	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14 dokumen	Rp. 47.653.800	
k	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	Rp. 50.000.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	Rp. 50.000.000	
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Rp. 4.845.963.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Rp. 4.845.963.000	
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	24 unit	Rp. 500.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	24 unit	Rp. 500.000.000	
b	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	96 unit	Rp. 984.500.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	96 unit	Rp. 984.500.000	
c	Pengadaan alat besar	Makassar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	12 unit	Rp. 49.497.000	Pengadaan alat besar	Makassar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	12 unit	Rp. 49.497.000	
d	Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Makassar	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor	12 unit	Rp. 14.400.000	Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Makassar	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor	12 unit	Rp. 14.400.000	
e	Pengadaan mebel	Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	Rp. 478.896.000	Pengadaan mebel	Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	Rp. 478.896.000	
f	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 unit	Rp. 445.520.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 unit	Rp. 445.520.000	
g	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	39 unit	Rp. 54.150.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	39 unit	Rp. 54.150.000	
h	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	Rp. 20.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	Rp. 20.000.000	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
i	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	Rp. 2.000.000.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	Rp. 2.000.000.000	
j	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	Rp. 99.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	Rp. 99.000.000	
k	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 unit	Rp. 200.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 unit	Rp. 200.000.000	
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp. 8.863.012.168	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp. 8.863.012.168	
a	Penyediaan jasa surat menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Rp. 5.500.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Rp. 5.500.000	
b	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Rp. 601.709.880	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Rp. 601.709.880	
c	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan		
d	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Rp. 8.255.802.288	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Rp. 8.255.802.288	
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	Rp. 2.249.930.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	Rp. 2.249.930.000	
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 unit	Rp. 151.200.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 unit	Rp. 151.200.000	
b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	421 unit	Rp. 598.480.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	421 unit	Rp. 598.480.000	



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dinas operasional atau lapangan		Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			dinas operasional atau lapangan		Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
c	Pemeliharaan Mebel	Makassar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	Rp. 19.000.000	Pemeliharaan Mebel	Makassar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	Rp. 19.000.000	
d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	Rp. 91.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	Rp. 91.250.000	
e	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Makassar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 unit	Rp. 31.200.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Makassar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 unit	Rp. 31.200.000	
f	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah aset tak berwujud yang di pelihara	1 unit	Rp. 20.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah aset tak berwujud yang di pelihara	1 unit	Rp. 20.000.000	
g	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 unit	Rp. 1.008.800.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Makassar	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	24 unit	Rp. 1.008.800.000	
h	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	Rp. 130.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	10 unit	Rp. 130.000.000	
g	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	18 unit	Rp. 200.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	18 unit	Rp. 200.000.000	
h	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Makassar	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	1.693 ha		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Makassar	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	1.693 ha		
Total					Rp. 139.172.247.582	Total					Rp. 139.172.247.582



2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditentukan dari prosesnya, diantaranya melalui pendekatan *bottom up* dimana perencanaan yang dilakukan dari penjaringan aspirasi masyarakat pemberi gagasan awal terkait kebutuhan nyata pada tingkat masyarakat dan penerima dampak kegiatan pembangunan yang direncanakan. Hasil penjaringan ini, dibahas secara berjenjang mulai dari murenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten. Hasil penjaringan aspirasi kebutuhan suatu daerah yang menjadi kewenangan provinsi diusulkan melalui Rakortek provinsi sebagai media penyelarasan usulan berdasarkan kewenangan pengelolaan urusan masing-masing bidang pembangunan

Table TC-32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan		Persentase jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	16,76 %	
	Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan		Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya	60 orang	
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	60 orang	
	Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Luas kawasan yang dipersiapkan untuk perhutanan sosial	2.000 ha	
A.	Pengembangan kapasitas kelompok tani hutan melalui peningkatan Kelola kelembagaan, Kelola kawasan dan Kelola usaha				
	a. Pengembangan Kelola kelembagaan	Kelurahan Laiyolo Baru Kecamatan Bontolikuyu Kabupaten Selayar	Pelatihan Kelompok tani hutan dalam rangka peningkatan pengelolaan lembaga dan pengelolaan usaha	1 paket	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	b. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua Kabupaten :Pinrang	Pengembangan bibit kopi di wilayah KTH. Padang Sipatuo	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	c. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Battusawe Kecamatan Duampanua Kabupaten :Pinrang	Pengembangan bibit kopi di wilayah KTH. Kajao	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	d. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten :Pinrang	Pengembangan bibit kopi di wilayah KTH. Labuang Cenrana	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan



## RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	e. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Rajang Kecamatan Duampanua Kabupaten :Pinrang	Pengembangan bibit kopi di wilayah KTH. Massoping	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	f. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Tapporang Kecamatan Batu Lappa Kabupaten :Pinrang	Pengembangan bibit kopi di wilayah KTH. Sipakatau	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	g. Pengembangan kelola kawasan	Kecamatan Lembang Kabupaten :Pinrang	Pengembangan bibit kopi di wilayah KTH. Buttu Balu	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	h. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Katompurang Kecamatan Batu Lappa Kabupaten :Pinrang	Pengembangan bibit kopi di wilayah KTH. Maddara Takkue	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	i. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Suppirang Kecamatan Lembang Kabupaten :Pinrang	Pengembangan bibit kopi di wilayah KTH. Harapan Baru	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	j. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Buttusawe Kecamatan - Kabupaten :Pinrang	Pengembangan bibit kopi di wilayah KTH. Pocing Lemo	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	k. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Kassa Kecamatan Batu Lappa Kabupaten :Pinrang	Pengembangan bibit kopi di wilayah KTH. Soping Sejahtera	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	l. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten :Pinrang	Pengembangan bibit kopi di wilayah KTH. DeaCakke	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	m. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Buttusawe Kecamatan Duampanua Kabupaten :Pinrang	Pengembangan bibit kopi di wilayah KTH. Terpulu	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	n. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Buttusawe Kecamatan Duampanua Kabupaten :Pinrang	Pengembangan bibit kopi di wilayah KTH. Sipakatau	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	o. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Kalempang Kecamatan :Pitu Riawa Kabupaten Sidrap	Pengembangan bibit kopi di wilayah KUPS harapan Baru	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan



## RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	p. Pengembangan Kelola usaha	Kelurahan Baruppu Utara, Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara	Sarana Kelola usaha	1 unit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	q. Pengembangan kelola kawasan	Kabupaten Maros	Pembuatan hutan mangrove	5 kelompok tani	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	r. Pengembangan kelola kawasan	Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros	Bantuan bibit tanaman produktif	25 kelompok tani	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	s. Pengembangan kelola kawasan	Kecamatan Donri Donri Kabupaten Soppeng	Bantuan bibit murbei	5 paket	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	t. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Kalempong Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap	Pengembangan bibit kopi KUPS Pagolla	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	u. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Kalempong Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap	Pengembangan bibit kopi KUPS Lestari	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	v. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Kalempong Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap	Pengembangan bibit kopi KUPS Lestari 1	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	w. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Kalempong Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap	Pengembangan bibit kopi KUPS Lestari 2	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	x. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Batu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap	Pengembangan bibit kopi KUPS Tuju Wali Wali	25.000 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	y. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Batu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap	Pengembangan bibit kopi KUPS Porang	25.000 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	z. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Rajag Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang	Pengembangan bibit kopi KTH Sipakainga	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	aa. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap	Pengembangan bibit kopi KUPS Harapan Jaya	13.250 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	bb. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap	Pengembangan bibit kopi KUPS Sipatuo	25.000 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	cc. Pengembangan kelola kawasan	Kelurahan Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang	Pengembangan bibit kopi KTH Bubun Panden	25.000 bibit	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	dd. Pengadaan bibit kopi	Kab, Pinrang	Pengadaan bibit kopi	1 paket	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	ee. Pengadaan bibit kopi	Kab, Pinrang	Pengadaan bibit kopi	1 kegiatan	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
2	Program Pengelolaan Hutan		Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	65,47 %	
			Persentase kerusakan hutan	14,82 %	
			Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	92.336,62 m3	
			Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 ton	
	Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara		Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara	1.571 ha	
	Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan		Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun	150 unit	
B	a. Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air	Kab. Soppeng	Bangunan konservasi tanah dan air	3 paket	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di luar kawasan hutan negara		Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	450 ha	
C	Pengembangan tanaman produktif				
	a. Bibit produktif	Kab Pinrang	Bibit pala KTH Sumberdaya Alam	1000 pohon	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan
	b. Bibit produktif	Kelurahan Ullusaddang Kecamatan Lembang KabPinrang	Bibit pala KTH Kandasuli	1000 pohon	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima



## RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					harus terdaftar dalam database kehutanan
	c. Bibit produktif	Kelurahan Ullusaddang Kecamatan Lembang Kab Pinrang	Bibit pala KTH Mattiro Saddang	1000 pohon	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, melengkapo administrasi kelompok calon penerima dan kelompok penerima harus terdaftar dalam database kehutanan



## BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

## 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam RPJMD di Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 - 2023 dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perwujudan pencapaian misi pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan berupa hasil pembangunan daerah.

Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2023 merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasi secara terukur, spesifik dan dapat dicapai secara rasional dalam kurun waktu 3 tahun ke depan (2021-2023). Sasaran ini juga juga menampilkan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan tahapan akhir dari pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan.

Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2018- 2023 berdasarkan Misi, dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjabaran tujuan pada Misi 1 adalah: Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, dengan rumusan sasaran sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
  - b. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penjabaran tujuan pada Misi 2 adalah: Meningkatkan Pemerataan infrastruktur wilayah, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah
3. Penjabaran tujuan pada Misi 3 adalah: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah
  - b. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat



4. Penjabaran tujuan pada Misi 4 adalah: Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan
  - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  - c. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan
  - d. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.
5. Penjabaran tujuan pada Misi 5 terbagi atas 2 tujuan yaitu :
  - a. Meningkatkan produktivitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
    - a.1 Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah
  - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan rumusan sasaran:
    - b. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

### 3.1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Rancangan Tema RKP tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Untuk mewujudkan tema tersebut maka ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

#### Prioritas Nasional



Sasaran pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan



manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata.

### 3.1.2.1 Arah kebijakan pembangunan wilayah tahun 2023

Arah kebijakan pengembangan wilayah tahun 2022 meliputi :

1. Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan
2. Mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah,
3. Mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan
4. Mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah

#### Strategi Pengembangan Wilayah

1. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi, serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara
2. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.

#### Sasaran Pengembangan Wilayah

1. Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah,
2. Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2023 difokuskan pada (1) Percepatan laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan sektor unggulan; (2) penurunan tingkat kemiskinan melalui percepatan pemenuhan SPM; (3) peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial



ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi Covid-19, serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Adapun target pembangunan wilayah Sulawesi sesuai dengan Rancangan RKP 2023.

Indikator	Target Tahun 2023					
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,30	8,30	8,10	8,60	7,80	6,40
Tingkat Kemiskinan (%)	5,93	11,85	6,75	8,15	13,65	7,51
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,90	2,80	4,50	2,80	2,40	2,30

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024

### 3.1.2.2 Arah kebijakan Pengembangan wilayah Sulawesi tahun 2023

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana umum tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) beserta rencana rincinya yaitu Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Arah kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi mengarah pada :

1. Mempertahankan momentum pertumbuhan yang relative tinggi melalui diversifikasi kegiatan ekonomi
2. Memantapkan perannya sebagai *hub* dan pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan timur
3. Mendorong tranformasi perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah
4. Mendorong perannya sebagai salah satu lumbung pangan nasional
5. Memperkuat mitigasi bencana dan pemulihan pasca bencana

Gambaran integrasi pembangunan wilayah Sulawesi Selatan dalam kerangka pembangunan wilayah Pulau Sulawesi digambarkan dalam peta pengembangan wilayah sebagai berikut :





- dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
  3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
  4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Target sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

IKU	Sasaran Strategis dan Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja tahun 2022
Sasaran 1 : Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,48
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	%	17,38
3	Penurunan Laju Deforestasi	Juta ha	0,33
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	67
5	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	Ribu ha	230
6	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi ( <i>High Conservation Values</i> )	Juta ha	12,10



IKU	Sasaran Strategis dan Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja tahun 2022
Sasaran 2 : Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan			
7	Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional	Rp trilyun	112
8	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	US \$ Milyar	15
9	Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	Rp trilyun	5,4
Sasaran 3 : Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
10	Luas Kawasan hutan dengan Status Penetapan	Juta ha	9
11	Luas Kawasan hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)	Ribu ha	600
12	Luas Kawasan hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Ha	750.000
Sasaran 4 : Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing			
13	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan	Poin	2,5
14	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	Kasus	2.962
15	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,65

### 3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah

Prioritas tahun 2023 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupti pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus



dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023.

Tahun 2023 masih difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu:

" Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter"

Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penguatan infrastruktur wilayah
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
5. Peningkatan pembangunan manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7. Pelestarian lingkungan hidup

Penetapan sasaran pembangunan dari prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 merupakan upaya dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah tahun 2023, tersaji pada tabel berikut :



Tabel 3  
Target Kinerja Utama Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	RPJPD Tahun 2023	Target		
						RPJPD	RPJMN	
1	Penguatan Perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah Berstabilnya tingkat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Ward/ angka	A (81 - 90)	A (81 - 90)	
			2	Nilai SARIP Provinsi	Ward/ angka	A1 (88-90)	A1 (88-90)	
			3	Indeks Pelayanan Publik	Ward/ angka	A (4,51 - 5,0)	A (4,51 - 5,0)	
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	4	Indeks Williamson	Angka	0,807	0,807	
			5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	0,4	0,4	
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata Meningkatnya penyediaan tenaga kerja sektor unggulan daerah	6	PUHR Pengusaha ATRIR	Rp. juta	65,06	65,06	
			7	Tingkat Kersudatan	%	745	745	6,5%
			8	Tingkat Peningkatan Investasi	%	5,69	5,69	4,5
4	Pemertanian kesetaraan sosial ekonomi	Meningkatnya kesetaraan pendapatan antar lapisan masyarakat	9	Ketis Gini	Angka	0,301	0,301	
5	Akselerasi pembangunan sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inovatif dan Berkarakter Meningkatnya keparipatiran dan pemerataan Pendidikan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kemandirian generasi dalam pendidikan Meningkatnya kualitas etno-riwayat apresiasi budaya dalam kehidupan masyarakat	10	IPM	Angka	73,05	73,05	
			11	Indeks Pendidikan	Angka	67,05	67,05	
			12	Indeks Kesehatan	Angka	77,06	77,06	
			13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	77,23	77,23	
			14	Angka Literasi	Ratus	24,400	24,400	
6	Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui hilirisasi industri	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	15	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04-6,52	5,04-6,52	0,1
			16	Produktivitas Total Daerah	Rp/ Anggaran Kerja	77.340.122	77.340.122	
7	Peningkatan Efisiensi Anggaran Hibah	Meningkatkan efisiensi anggaran hibah untuk kesejahteraan Terpaduhannya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan	17	IKLH	point	7,04	7,04	
			18	Potensi Pemanfaatan modal GMR (Juta Ton CO2e)	Juta Ton CO2e	1,347	1,347	

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 4  
Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022

Prioritas Pembangunan		Sasaran		Arah Kebijakan
1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik
		2	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
2	Meningkatkan pemerataan infrastruktur daerah	3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	Penyediaan infrastruktur sumberdaya air
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah
				Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata
				Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata



Prioritas Pembangunan		Sasaran		Arah Kebijakan
		5	Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya
4	Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif	6	Meningkatnya kualitas dan pemerataan Pendidikan	Akselerasi peningkatan kualitas lulusan Pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi
		7	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar
		8	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak
		9	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan peran masyarakat dan Lembaga keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan Peningkatan pemberdayaan Lembaga keagamaan, pesantren, penyelenggara keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan
5	Meningkatkan produktivitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah	10	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan dan kemaritiman
		11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Penguatan upaya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon

### 3.2.1 Sasaran Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mendukung pencapaian RPJMD tahun 2018-2023 pada :

Tabel 5

#### Keterkaitan RPJMD dan Renstra

RPJMD				Renstra		
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan Dinas			
3	Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif	3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	5	Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan
5	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan	5	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	10	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	
		11	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	



Tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan kepada Visi, Misi dan Tujuan RPJMD, prioritas isu-isu strategis, serta memperhatikan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat. Tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan “Mengoptimalkan Pengelolaan Kawasan Hutan”

Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 6

Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dan 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja tahun 2022	Target Kinerja tahun 2023
1 Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah		Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Persen	75	75
	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	75	75
		Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	Persen	90	90
		Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	Persen	90	90
		Persentase Temuan Material	Persen	2	0
2 Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan		Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Kewenangan Provinsi	Ha	1.780.029	1.780.029
	2 Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	58,66	58,68
	3 Meningkatkan Kontribusi Kehutanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Kontribusi PDRB Kehutanan terhadap PDRB Sulsel	Persen	0,07	0,08
		Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	Ha	12.000	12.000
	4 Meningkatkan Akses Legal Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	Persen	7,89	9,01
		Persentase Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	Persen	15	20
5 Terjaganya Fungsi dan Legalitas Kawasan Hutan	Persentase Luas kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi	Persen	64,67	64,67	



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja tahun 2022	Target Kinerja tahun 2023
		dan kepastian hukumnya			
		Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	KPH	24	24

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 mencakup 5 (lima) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 101 (seratus satu) sub kegiatan. Program dan kegiatan disusun untuk pencapaian visi, misi Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang pada RPJMD tahun 2018-2023.

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Hutan, terdiri atas kegiatan
  - a. Kegiatan pengelolaan rencana tata hutan KPH kewenangan provinsi, dengan sub kegiatan:
    - Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH
    - Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH
    - Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana operasionalisasi KPH
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
  - b. Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi
    - Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung
    - Pelayanan perizinan usaha/kerjasama melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintergrasi secara elektronik di kawasan hutan produksi dan hutan lindung pada blok pemanfaatan kecuali pada wilayah perum perhutani
    - Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi
    - Penilaian rencana pengelolaan di kawasan hutan produksi
    - Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan



- d. Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, dengan sub kegiatan :
- Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
  - Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara
  - Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara
  - Penerapan Teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan
  - Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan
  - Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan.
  - Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan
- e. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dengan sub kegiatan :
- Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan
  - Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan
  - Pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan
- f. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dengan sub kegiatan:
- Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
- g. Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <math><6.000\text{ m}^3</math> per tahun, dengan sub kegiatan :
- Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <math><6000\text{ m}^3</math>/tahun
  - Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <math><6.000\text{ m}^3</math> per tahun
- h. Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan sub kegiatan :
- Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar
  - Sertifikasi sumber benih
  - Sertifikasi mutu benih
  - Sertifikasi mutu bibit
  - Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit
  - Pembangunan sumber benih
2. Program konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, dengan kegiatan :



- a. Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
  - Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES
3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, dengan kegiatan :
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, dengan sub kegiatan :
    - Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan
    - Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan
    - Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial
4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dengan kegiatan :
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan
    - Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS
    - Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS
    - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
    - Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS
    - Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS
5. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan kegiatan :
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
    - Evaluasi kinerja perangkat daerah
  - b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
    - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN



- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
  - Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
  - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
  - Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
  - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD
  - Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- c. Kegiatan Administarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengamanan barang milik daerah SKPD
  - Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD
  - Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
  - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
  - Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
  - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
  - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan peralatan rumah tangga
  - Penyediaan bahan logistik kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyediaan bahan/material
  - Fasilitasi kunjungan tamu
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD



- g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan alat besar
  - Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor
  - Pengadaan mebel
  - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
  - Pengadaan asset tetap lainnya
  - Pengadaan asset tak berwujud
  - Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
  - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
  - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan mebel
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan asset tetap lainnya
  - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
  - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
  - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya



Program dan kegiatan tersebut diatas, merupakan program dan kegiatan yang juga mendukung program kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kabupaten/kota. Terdapat 16 unit KPH sebagai UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tugas fungsi perencanaan, pelayanan teknis pengelolaan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pagu indikatif program dan kegiatan tahun 2023, akan bersumber dari dana APBD, DAK Penugasan dan DBH.



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 memuat program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian sasaran Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, serta mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kehutanan.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat prioritas perangkat daerah yang mendukung prioritas provinsi dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran 5 (lima) *menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat*, sasaran 10 (sepuluh) *meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah* dan sasaran 11 (sebelas) *terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pembangunan* yang tertuang pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

Rencana kerja program dan kegiatan prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung prioritas provinsi tahun 2023, sebagai berikut :



Tabel TC-33  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
Dan perkiraan maju Tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kehutanan								
	Kehutanan								
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi		65,47 %	Rp. 13.935.525.020		Program Prioritas	65,47 %	Rp. 15.989.203.072
		Persentase kerusakan hutan		14,80 %		14,80 %			
		Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan		92.336,62 m <sup>3</sup>		92.336,62 m <sup>3</sup>			
		Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu		283 ton		283 ton			
	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi	Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya		1.780.029 ha	Rp. 788.716.120			1.780.029 ha	Rp. 1.180.000.000
	Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun	Bone, Jenepono Luwu, Lutra, Sinjai Wajo Lutim	1 dokumen	Rp. 190.000.000	APBD		1 dokumen	Rp. 200.000.000
	Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH	Jumlah unit kesatuan pengelolaan hutan produksi/lindung yang telah dilakukan pembagian blok	Bantaeng, Barru, Bone Gowa Enrekang Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja, Lutim Torut	16 unit	Rp. 423.164.220	APBD		16 unit	Rp. 800.000.000
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi resort dan kantor resort kesatuan pengelolaan hutan yang terbangun	Bantaeng Barru, Bone Gowa Enrekang Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja, Lutim Torut	10 unit	Rp. 100.000.000	APBD		10 unit	Rp. 100.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan Hutan	Makassar	1 dokumen	Rp. 75.551.900	APBD		1 dokumen	Rp. 80.000.000



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi							
	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH yang tersusun		24 dokumen	Rp. 190.000.000			24 dokumen	Rp. 240.000.000
	Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan	Sulsel	24 dokumen	Rp. 190.000.000	APBD		24 dokumen	Rp. 240.000.000
	Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan		Rp. 25.000.000	Rp. 587.671.000			Rp. 25.000.000	Rp. 590.000.000
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Bone Gowa Maros	4 dokumen	Rp. 78.146.000	APBD		4 dokumen	Rp. 50.000.000
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Bantaeng Barru, Enrekang Luwu Lutra Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	10 dokumen	Rp. 49.890.000	APBD		10 dokumen	Rp. 50.000.000
	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Makassar	10 dokumen	Rp. 49.620.000	APBD		10 dokumen	Rp. 50.000.000
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Bone Gowa Maros	10 Dokumen	Rp. 60.420.000	APBD		10 Dokumen	Rp. 70.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung						10 dokumen	Rp. 70.000.000
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Bantaeng Bone Barru Bulukumba Enrekang Gowa Jeneponto	4 dokumen	Rp. 49.594.400	APBD		4 dokumen	Rp. 50.000.000



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Luwu Luwu Utara Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Takalar Tana Toraja Wajo Palopo Lutim Torut						
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan						10 dokumen	Rp. 50.000.000
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Lokasi Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	2 lokasi	Rp. 300.000.000	APBD		2 lokasi	Rp. 200.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara		1.571 ha	Rp. 9.599.920.300			1.571 ha	Rp. 10.956.411.072
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Makassar	1 dokumen	Rp. 122.383.400	APBD		1 dokumen	Rp. 50.000.000
	Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	450 ha	Rp. 3.267.363.800	APBD/ DAK		450 ha	Rp. 4.645.727.500
	Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang	60 ha	Rp. 676.800.000	APBD		60 ha	Rp. 1.224.000.000



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut						
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan.	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	150 unit	Rp. 4.328.711.600	APBD/ DAK		150 unit	Rp. 4.331.734.572
	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit yang dihasilkan untuk Rehabilitasi Lahan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	25.000 btg	Rp. 684.564.500	APBD		25.000 btg	Rp. 170.000.000
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan rehabilitasi lahan	Bantaeng, Barru Bone, Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana toraja Lutim Toraja Utara	1 laporan	Rp. 68.303.400	APBD		1 laporan	Rp. 80.000.000
	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Bantaeng Barru Bone Bulukumba Jeneponto Luwu Lutra Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Takalar Wajo Palopo Luwu	20 ha	Rp. 451.793.600	APBD/ DAK		20 ha	Rp. 454.949.000
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Jumlah Kasus Kerusakan Kawasan hutan yang tertangani		100 %	Rp. 1.899.532.000			100 %	Rp. 1.882.792.000



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	1.780.029 ha	Rp. 1.377.612.000	APBD		1.780.029 ha	Rp. 1.377.792.000
	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Luwu Torut	1.780.029 ha	Rp. 217.850.000	APBD		1.780.029 ha	Rp. 200.000.000
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	2 operasi	Rp. 109.920.000	APBD		2 operasi	Rp. 110.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Sulsel	8 dokumen	Rp. 119.470.000	APBD		8 dokumen	Rp. 120.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Sulsel	6 laporan	Rp. 74.680.000	APBD		6 laporan	Rp. 75.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jenis HHBK yang diolah oleh pemegang izin		3 jenis	Rp. 67.009.200	APBD		3 jenis	Rp. 250.000.000
	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Unit Managemen Pengolahan Bahan Baku						15 unit	Rp. 50.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani						5 unit managemen	Rp. 50.000.000
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi						15 unit managemen	Rp. 75.000.000



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	Sulsel	3 unit managemen	Rp. 67.009.200	APBD		3 unit managemen	Rp. 75.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu		28.155,1717 ton	Rp. 127.080.000			28.155,1717 ton	Rp. 190.000.000
	Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Sulsel	30 unit managemen	Rp. 66.890.000	APBD		30 unit managemen	Rp. 75.000.000
	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Sulsel	30 dokumen	Rp. 60.190.000	APBD		30 dokumen	Rp. 75.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6.000 m3/ tahun melalui system pelayanan perizinan berusaha teritegrasi secara elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani						12 unit managemen	Rp. 40.000.000
	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan		95 pemohon	Rp. 675.596.400			95 pemohon	Rp. 700.000.000
	Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Bantaeng Bone Bulukumba Gowa Jeneponto Luwu Maros Pangkep Pinrang Selayar Sinjai Soppeng Takalar Torut Luwu Jeneponto Maros Pinrang Selayar Tana Toraja Torut	14 unit usaha	Rp. 99.980.000	APBD		14 unit usaha	Rp. 100.000.000
	Sertifikasi sumber benih	Jumlah sertifikasi sumber benih yang diterbitkan	Jeneponto Luwu Maros Pinrang Selayar Tana Toraja Torut	7 sertifikat	Rp. 49.930.000	APBD		7 sertifikat	Rp. 50.000.000
	Sertifikasi mutu benih	Jumlah Sertifikat mutu Benih yang Diterbitkan	Gowa Maros Jeneponto Pinrang Selayar	3 sertifikat	Rp. 49.930.000	APBD		3 sertifikat	Rp. 50.000.000



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Soppeng Tana Toraja Torut						
	Sertifikasi mutu bibit	Jumlah Sertifikat Mutu bibit yang Diterbitkan	Gowa Jeneponto Maros Pinrang Selayar Soppeng Tana Toraja Torut	7 sertifikat	Rp. 49.930.000	APBD		7 sertifikat	Rp. 50.000.000
	Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Bantaeng Bone Bulukumba Gowa Jeneponto Luwu Maros Pangkep Pinrang Selayar sinjai Soppeng Takalar Torut	14 laporan	Rp. 99.980.000	APBD		14 laporan	Rp. 100.000.000
	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	SElayar	5 ha	Rp. 325.846.400	APBD		5 ha	Rp. 350.000.000
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata		2 jenis	Rp. 83.011.800			2 jenis	Rp. 100.000.000
	Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi		100 penangkar	Rp. 83.011.800			100 penangkar	Rp. 100.000.000
	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Luwu Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Tana Toraja Lutim Torut	1 laporan	Rp. 83.011.800	APBD		1 laporan	Rp. 100.000.000
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan		16,78 %	Rp. 10.284.262.300		Program Prioritas	16,78 %	Rp. 13.650.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya		60 orang	Rp. 10.284.262.300			60 orang	Rp. 13.650.000.000



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya		60 orang				60 orang	
	Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Lutra Maros Pinrang Sidrap sinjai Soppeng Tana Toraja Parepare Palopo Lutim	200 orang	Rp. 192.063.300	APBD		200 orang	Rp. 200.000.000
	Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Bantaeng Barru Bone Enrekang Gowa Lutra Maros Pinrang Selayar Sidrap Soppeng Tana Toraja Lutim	169 KTH	Rp. 196.263.600	APBD		169 KTH	Rp. 200.000.000
	Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa Jeneponto Luwu Lutra Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Takalar Tana Toraja Wajo Parepare Palopo Lutim Torut	2.000 ha	Rp. 9.895.935.400	APBD/ DAK		2.000 ha	Rp. 13.250.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang direhabilitasi		2 DAS	Rp. 331.423.100		Program Prioritas	2 DAS	Rp. 470.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola di Provinsi Sulawesi Selatan		2 DAS	Rp. 331.423.100			2 DAS	Rp. 470.000.000
	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Makassar	1 dokumen	Rp. 75.000.000	APBD		2 dokumen	Rp. 75.000.000
	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Makassar	1 dokumen	Rp. 82.198.500	APBD		1 dokumen	Rp. 100.000.000



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Makassar	450 orang				250 orang	Rp. 120.000.000
	Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Makassar	1 lembaga	Rp. 92.802.000	APBD		1 lembaga	Rp. 100.000.000
	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS yang dihasilkan	Makassar	1 laporan	Rp. 81.422.600	APBD		1 laporan	Rp. 75.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah		100 %	Rp. 114.538.025.362			100 %	Rp. 143.989.800.972
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		100 %				100 %	
		Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)		100 %				100 %	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		100 %	Rp. 1.417.624.500			100 %	Rp. 1.550.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	2 dokumen	Rp. 779.898.600	APBD		2 dokumen	Rp. 850.000.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	1 dokumen	Rp. 92.796.600	APBD		1 dokumen	Rp. 90.000.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	1 dokumen	Rp. 85.000.000	APBD		1 dokumen	Rp. 90.000.000
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Makassar	1 dokumen	Rp. 94.093.200	APBD		1 dokumen	Rp. 90.000.000
	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Makassar	1 dokumen	Rp. 84.999.900	APBD		1 dokumen	Rp. 90.000.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	2 dokumen	Rp. 90.974.400	APBD		2 dokumen	Rp. 90.000.000
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	2 dokumen	Rp. 189.861.800	APBD		2 dokumen	Rp. 250.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu		100 %	Rp. 93.701.917.694			100 %	Rp. 110.371.129.157
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	768 orang/ bulan	Rp. 93.302.054.394	APBD		768 orang/ bulan	Rp. 109.946.129.157
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	9 dokumen	Rp. 9.999.800	APBD		9 dokumen	Rp. 10.000.000



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	5000 dokumen	Rp. 9.999.900	APBD		5000 dokumen	Rp. 10.000.000
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	1 laporan	Rp. 74.937.000	APBD		1 laporan	Rp. 75.000.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	1 laporan	Rp. 94.977.000	APBD		1 laporan	Rp. 95.000.000
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Makassar	3 laporan	Rp. 129.999.800	APBD		3 laporan	Rp. 130.000.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Makassar	14 laporan	Rp. 74.949.800	APBD		14 laporan	Rp. 100.000.000
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	1 laporan	Rp. 5.000.000	APBD		1 laporan	Rp. 5.000.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen laporan barang milik daerah		2 dokumen	Rp. 118.582.400			2 dokumen	Rp. 170.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						4 dokumen	Rp. 50.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	20 dokumen	Rp. 50.124.200	APBD		20 dokumen	Rp. 50.000.000
	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	1 laporan	Rp. 59.084.200	APBD		1 laporan	Rp. 50.000.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						24 laporan	Rp. 10.000.000
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	2 laporan	Rp. 4.637.000	APBD		2 laporan	Rp. 5.000.000
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	16 laporan	Rp. 4.737.000	APBD		16 laporan	Rp. 5.000.000
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)		Rp. 1.712.430.000	Rp. 68.303.400			Rp. 1.712.430.000	Rp. 105.000.000
	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah						1 laporan	Rp. 10.000.000
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Makassar	16 laporan	Rp. 68.303.400	APBD		16 laporan	Rp. 75.000.000
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah						1 laporan	Rp. 10.000.000



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah						1 laporan	Rp. 10.000.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN		90	Rp. 874.771.800			90	Rp. 1.200.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						5 unit	Rp. 50.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Makassar	1.150 paket	Rp. 441.850.000	APBD		1.150 paket	Rp. 575.000.000
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	24 dokumen	Rp. 72.310.000	APBD		24 dokumen	Rp. 75.000.000
	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian						24 dokumen	Rp. 75.000.000
	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	1 dokumen	Rp. 60.611.800	APBD		1 dokumen	Rp. 50.000.000
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Makassar	125 orang	Rp. 200.000.000	APBD		125 orang	Rp. 200.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan						120 orang	Rp. 75.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Makassar	120 orang	Rp. 100.000.000	APBD		120 orang	Rp. 100.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor		100 %	Rp. 2.397.920.400			100 %	Rp. 1.690.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Makassar	26 paket	Rp. 62.000.000	APBD		26 paket	Rp. 70.000.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar	26 paket	Rp. 70.000.000	APBD		26 paket	Rp. 70.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Makassar	26 paket	Rp. 60.001.000	APBD		26 paket	Rp. 50.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Makassar	26 paket	Rp. 351.652.200	APBD		26 paket	Rp. 350.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Makassar	26 jenis	Rp. 168.720.000	APBD		26 jenis	Rp. 250.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Makassar	4 dokumen	Rp. 20.000.000	APBD		4 dokumen	Rp. 20.000.000
	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket/material yang disediakan	Makassar	1 paket	Rp. 9.999.800	APBD		1 paket	Rp. 10.000.000
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	12 laporan	Rp. 46.280.000	APBD		12 laporan	Rp. 50.000.000



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	150 laporan	Rp. 1.511.613.600	APBD		150 laporan	Rp. 700.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	14 dokumen	Rp. 47.653.800	APBD		14 dokumen	Rp. 50.000.000
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	6 dokumen	Rp. 50.000.000	APBD		6 dokumen	Rp. 70.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	Rp. 4.845.963.000			100 %	Rp. 17.566.318.352
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Makassar	24 unit	Rp. 500.000.000	APBD		24 unit	Rp. 5.000.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Makassar	96 unit	Rp. 984.500.000	APBD		96 unit	Rp. 1.000.000.000
	Pengadaan alat besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Makassar	12 unit	Rp. 49.497.000	APBD		12 unit	Rp. 60.000.000
	Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor	Makassar	12 unit	Rp. 14.400.000	APBD		12 unit	Rp. 50.000.000
	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Makassar	100 unit	Rp. 478.896.000	APBD		100 unit	Rp. 500.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Makassar	100 unit	Rp. 445.520.000	APBD		100 unit	Rp. 500.000.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Makassar	39 unit	Rp. 54.150.000	APBD		39 unit	Rp. 100.000.000
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Makassar	1 unit	Rp. 20.000.000	APBD		1 unit	Rp. 100.000.000
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Makassar	1 unit	Rp. 2.000.000.000	APBD		1 unit	Rp. 9.556.318.352
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Makassar	8 unit	Rp. 99.000.000	APBD		8 unit	Rp. 200.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	6 unit	Rp. 200.000.000	APBD		6 unit	Rp. 500.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	Rp. 8.863.012.168			100 %	Rp. 9.042.353.463
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	1 laporan	Rp. 5.500.000	APBD		1 laporan	Rp. 25.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Makassar	1 laporan	Rp. 601.709.880	APBD		1 laporan	Rp. 605.000.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 laporan	Rp. 100.000.000



RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Makassar	1 laporan	Rp. 8.255.802.288	APBD		1 laporan	Rp. 8.267.353.463
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik		100 %	Rp. 2.249.930.000			100 %	Rp. 2.295.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Makassar	13 unit	Rp. 151.200.000	APBD		13 unit	Rp. 107.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Makassar	421 unit	Rp. 598.480.000	APBD		421 unit	Rp. 628.000.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Makassar	50 unit	Rp. 19.000.000	APBD		50 unit	Rp. 80.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Makassar	100 unit	Rp. 91.250.000	APBD		100 unit	Rp. 150.000.000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Makassar	2 unit	Rp. 31.200.000	APBD		2 unit	Rp. 50.000.000
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang di pelihara	Makassar	1 unit	Rp. 20.000.000	APBD		1 unit	Rp. 30.000.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Makassar	24 unit	Rp. 1.008.800.000	APBD		24 unit	Rp. 500.000.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Makassar	10 unit	Rp. 130.000.000	APBD		10 unit	Rp. 300.000.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Makassar	18 unit	Rp. 200.000.000	APBD		18 unit	Rp. 350.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi						1.693 ha	Rp. 100.000.000
TOTAL					Rp. 139.172.247.582				Rp. 174.199.004.044



Dari tabel TC-33 di atas, diuraikan lebih lanjut program dan kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender dan mitigasi perubahan iklim sebagai bentuk komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerapan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca, deforestasi dan degradasi hutan.

Program dan kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender pada tahun 2023 yaitu :

1. Program Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan (Program Prioritas)
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan di bidang kehutanan, dengan rencana aksi melalui
    - Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang Kehutanan
    - Pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan
    - Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial
2. Program Pengelolaan Hutan (Program Prioritas)
  - a. Kegiatan pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, dengan rencana aksi melalui
    - Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan

Program dan kegiatan yang mendukung mitigasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon pada tahun 2023

1. Program Pengelolaan Hutan (Program Prioritas)
  - a. Kegiatan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan melalui
    - Pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara
    - Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara
    - Penerapan Teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan
    - Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan
  - b. Kegiatan pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, melalui
    - Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan
    - Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan
    - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan



2. Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (Program Prioritas)
  - a. Kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, melalui
    - Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada sasaran kinerja dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Rencana kerja tersebut menunjukkan kesesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023

- a. Pengendalian pelaksanaan pembangunan kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.
- b. Penilaian akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023

### 5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah dan target kinerja sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.

Untuk itu, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut, dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen penganggaran sesuai dokumen perencanaan agar tercipta konsistensi dokumen
2. Melaksanakan rencana kerja tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
3. Melakukan pengendalian dan pemantauan rencana kerja secara periodik (triwulan, semester)

### 5.2 Rencana tindak lanjut.

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA dan DPA tahun 2023) dengan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.

Selain itu rencana kerja 2023 menjadi pedoman dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan.